

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan beberapa Kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, yaitu Kecamatan Pakem, Turi, Tempel, Ngemplak dan Cangkringan. Kecamatan Cangkringan merupakan daerah dengan risiko bencana erupsi Gunung Merapi paling tinggi (Fatmawati dan Rahayu (2016) dalam (Wahyuni & Sakir, 2021, p.). Terdapat 5 desa yang terletak di Kecamatan Cangkringan yaitu Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo, Wukirsari, dan Argomulyo.

Desa Glagaharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cangkringan yang berada paling dekat dengan puncak gunung Merapi, yaitu hanya berjarak 3,98 km. Desa tersebut merupakan desa yang mengalami kerusakan paling parah, hampir seratus persen wilayahnya terkena dampak erupsi gunung Merapi tahun 2010 (Citra, 2014, p. 62). Hal tersebut akan mengancam kestabilan ketahanan wilayah dari daerah tersebut. Menanggapi ancaman tersebut dilaksanakan program pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Glagaharjo. Pembentukan Destana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana erupsi Gunung Merapi dan menjaga kestabilan ketahanan wilayah. Penelitian ini meneliti terkait pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.

4.1.1 Profil Desa Glagaharjo

Desa Glagaharjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa Glagaharjo dahulu bernama Glagahsari. Kondisi tanah pada waktu itu sangat gersang, sehingga hanya tanaman Glagah yang masih tetap dapat hidup. Dengan dasar itu maka masyarakat disana menamakan daerah tersebut “Glagahsari” (Glagah saestu lestari) yang kemudian diubah menjadi “Glagaharjo”. Arti nama Glagaharjo secara harfiah yaitu: Glagah yang diambil dari tanaman Glagah dan Harjo (Raharjo) yang berarti makmur/tentram, sehingga diharapkan masyarakat di wilayah Glagah akan menjadi makmur dan tentram. Dasar hukum terbentuknya Desa Glagaharjo adalah Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946 yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah – Daerah Kelurahan (RPJMDes, 2021, p. 10).

Desa Glagaharjo merupakan wilayah pegunungan yang memanjang dari utara ke selatan. Desa ini terletak pada 110°27'0" BT-110°28'12" dan 7°33'28" LS-7°39'11" LS. Batas wilayah Desa Glagaharjo meliputi:

- a. Sebelah utara: Taman Nasional Gunung Merapi
- b. Sebelah timur: Kabupaten Klaten dan Sungai Woro
- c. Sebelah selatan: Desa Argomulyo
- d. Sebelah barat: Desa Kepuharjo dan Sungai Gendol

Wilayah desa dibagi menjadi 10 dusun, 20 RW dan 41 RT, dengan rincian sebagai berikut:

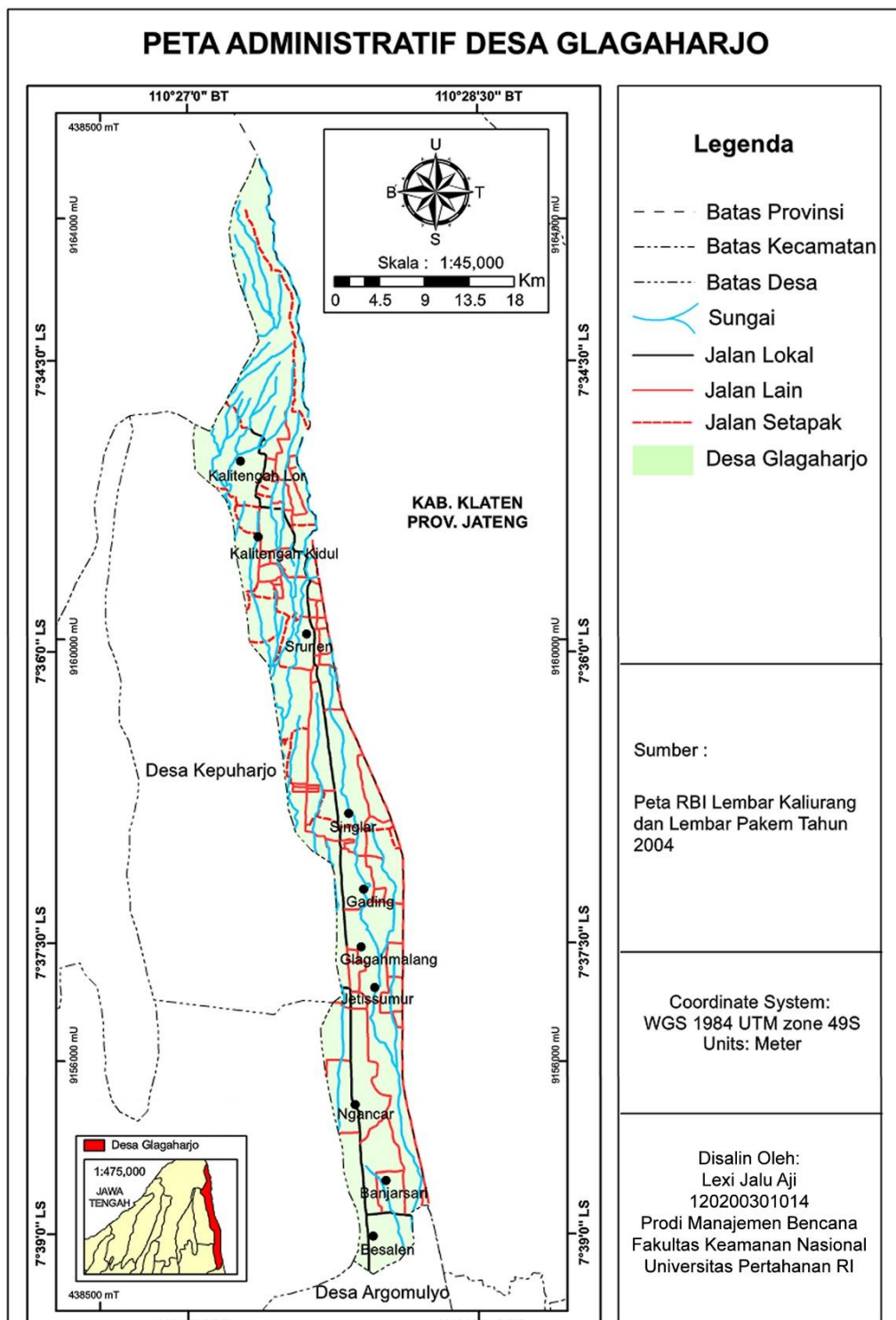
Tabel 4.1 Data Padukuhan di Desa Glagaharjo (Update 2020)

No	Dusun	Nama Dukuh
1	Besalen	Sarwanto
2	Banjarsari	Sogiman
3	Ngancar	Teguh

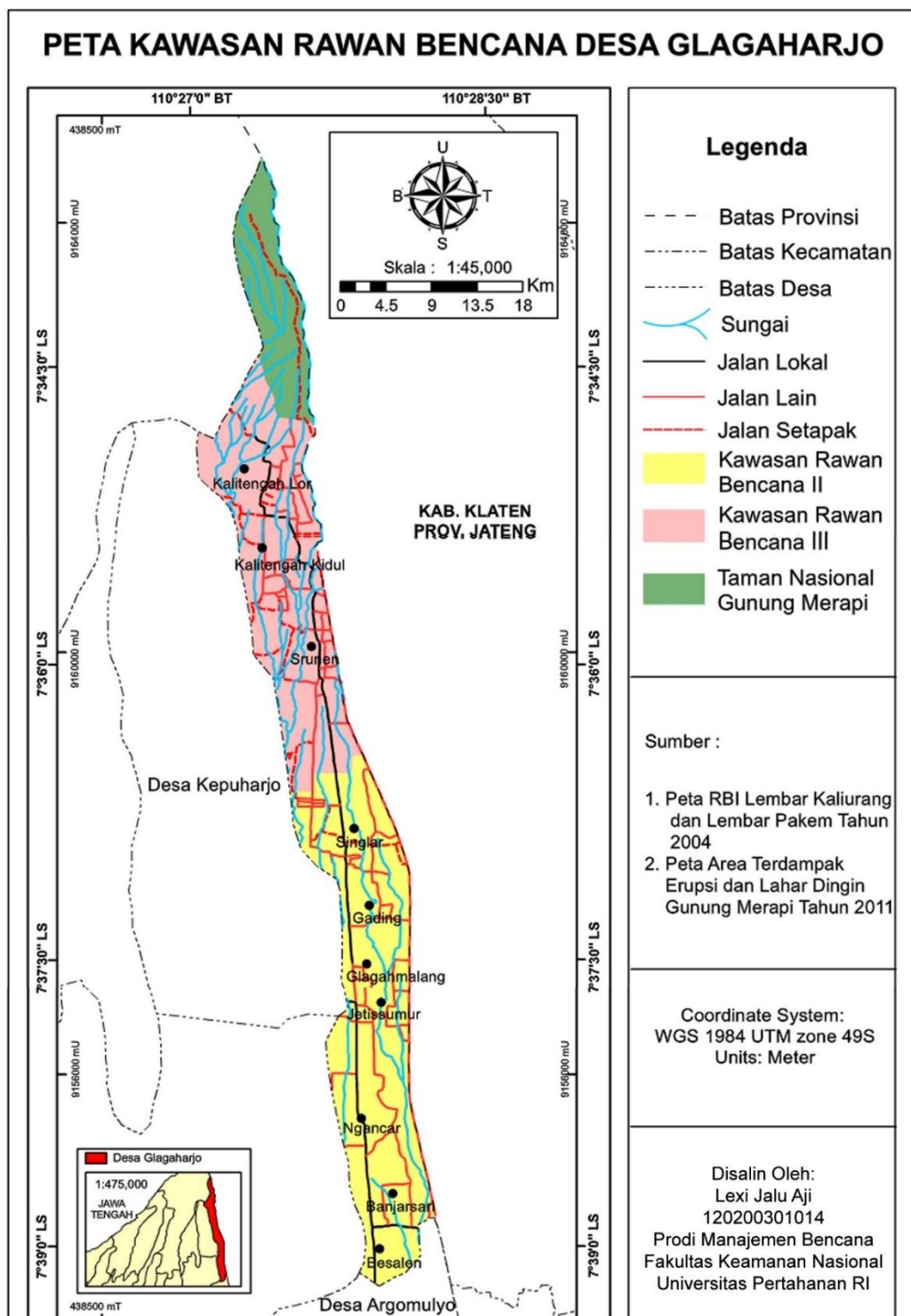
No	Dusun	Nama Dukuh
4	Glagah Malang	Wakhid Imam P
5	Jetis Sumur	Mardjono
6	Gading	Jumadi
7	Singlar	Sarjaka
8	Srunen	Sukatmin
9	Kalitengah Kidul	Jamin
10	Kalitengah Lor	Suwondo

Sumber: RPJMDes, 2020

Dari ke-10 dusun tersebut terdapat 3 dusun yang masuk Kawasan Rawan Bencana III (KRB III), yaitu dusun Srunen, Dusun Kalitengah Kidul dan Dusun Kalitengah Lor (Citra, 2014, p. 69). KRB III adalah kawasan yang paling dekat dengan sumber ancaman erupsi merapi, yang berpotensi tinggi terdampak awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, dan hujan abu dari Gunung Merapi. Akibat tingkat kerawanannya yang tinggi daerah ini tidak diziinkan sebagai daerah hunian tetap, namun hanya dapat digunakan sebagai hutan lindung untuk tujuan konservasi, pemanfaatan sumber daya air, kehutanan, pertanian, penelitian dan wisata alam. Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat yang ingin tetap menempati ketiga dusun tersebut (Kementerian ESDM, 2011). Menurut pengamatan, kubah lava yang terbentuk saat ini mengarah ke selatan tenggara, apabila terjadi erupsi maka langsung mengarah ke Desa Glagaharjo. Oleh karena itu, masyarakat Desa Glagaharjo terutama yang tinggal di KRB III harus memiliki kesiapsiagaan untuk menghadapi bahaya erupsi. Lokasi penelitian dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Glagaharjo
Sumber: Peta RBI Lembar Kaliurang dan Lembar Pakem (2004)



Gambar 4.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Desa Glagaharjo
Sumber: Peta RBI Lembar Kaliurang dan Lembar Pakem (2004)

Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa di pimpin seorang Lurah/Kepala Desa, 3 orang Kasi, 3 orang Kaur, 3 staf kelurahan/desa dan 10 orang Dukuh dari 10 padukuhan/dusun. Berikut ini data struktur organisasi Desa Glagaharjo:

Tabel 4.2 Data Struktur Organisasi Desa Glagaharjo (Update 2020)

No	Nama	Alamat	Bidang	Jabatan
1	Suroto	Kalitengah Kidul	Lurah	Lurah
2	Joko Purwanto	Jetis Sumur	Carik	Carik
3	Heri Prasetya	Banjarsari	Jagabaya	Jagabaya
4	Sriyono	Besalen	Kemakmuran	Ulu-ulu
5	Sarono	Banjarsari	Sosial	Kamituwo
6	Nurul Alviantini	Banjarsari	Danarta	Kepala Urusan Danarta
7	Sunardi	Banjarsari	Pangripta	Kepala Urusan Pangripta
8	Supriyadi	Banjarsari	Staf	Staf
9	-	-	Tata Laksana	Kepala Tata Laksana
10	Windarti	Jetis Sumur	Staf	Staf
11	Peni Lestari	Ngancar	Staf	Staf
12	Sarwanto	Besalen	Dukuh Besalen	Dukuh
13	Sogiman	Banjarsari	Dukuh Banjarsari	Dukuh
14	Teguh	Ngancar	Dukuh Ngancar	Dukuh
15	Wakhid Imam P	Glagah Malang	Dukuh Glagah Malang	Dukuh
16	Mardjono	Jetis Sumur	Dukuh Jetis Sumur	Dukuh
17	Jumadi	Gading	Dukuh Gading	Dukuh
18	Sarjaka	Singlar	Dukuh Singlar	Dukuh
19	Sukatmin	Srunen	Dukuh Srunen	Dukuh
20	Jamin	Kalitengah Kidul	Dukuh Kalitengah Kidul	Dukuh
21	Suwondo	Kalitengah Lor	Dukuh Kalitengah Lor	Dukuh

Sumber: RPJMDes, 2020

4.1.2 Profil Geografis dan Klimatologis Desa Glagaharjo

Menurut topografinya, Desa Glagaharjo berada di ketinggian 635 mdpl dan berjarak 4 sampai 5 km dari puncak Gunung Merapi. Desa Glagaharjo terletak pada bagian lereng atas Gunung Merapi. Bentuk lahan di Desa Glagaharjo dipengaruhi oleh relief berbukit dengan material penyusun dari endapan piroklastik dan merupakan bagian lereng dari tubuh gunungapi di bawah kerucut gunungapi.

Menurut Jenis tanahnya, jenis tanah di Desa Glagaharjo adalah tanah regosol. Bahan induk dari jenis tanah ini berupa abu dan pasir vulkanik. Jenis tanah regosol berwarna putih, coklat dan kekuning-kuningan. Jenis tanah ini masih muda belum mengalami diferensiasi horison, profil homogen, tekstur tanah pasir, struktur berbutir tunggal hingga remah, konsistensi lepas-lepas hingga gembur, warna kelabu hingga cokelat, permeabilitas cepat, pH antara 5,5 – 6,5 dan berasal dari material vulkanis yang bersifat piroklastik atau lahar. Umumnya jenis tanah regosol adalah tanah yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan karena karakteristiknya yang relatif subur.

Desa Glagaharjo mempunyai luas wilayah 1340 ha yang terbagi menjadi beberapa penggunaan lahan meliputi bangunan, tanah kering, dan tanah lainnya. Berikut ini rincian penggunaan lahan di Desa Glagaharjo dibagi menjadi berikut:

- a. Untuk sawah pertanian seluas 264,88 Ha
- b. Untuk tegalan dan pekarangan seluas 745,1 Ha
- c. Bangunan dan halaman seluas 274,847 Ha
- d. Jalan dan kali seluas 12 Ha

Data terkait curah hujan di Desa Glagaharjo dapat diklasifikasikan menurut teori Schidmt-Ferguson menggunakan prinsip pengambilan bulan kering dan bulan basah dengan menggunakan data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan curah hujan bulan basah dan bulan kering dan menghitung rata-ratanya. Desa Glagaharjo memiliki rata-rata curah hujan sebesar 0,47 mm/th. Rata-rata curah hujan bulan kering 3,4 mm/th dan rata-rata curah hujan bulan basah sebesar 7,6 mm/th. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai $Q = 0,47$ dan hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Glagaharjo memiliki tipe curah hujan C (agak basah).

Berkaitan dengan iklim, ketinggian suatu tempat akan mempengaruhi besar kecilnya temperatur. Semakin tinggi suatu tempat, temperaturnya akan

semakin kecil dan maupun sebaliknya. Rata-rata temperatur harian Desa Glagaharjo adalah 22,4⁰C.

4.1.3 Profil Demografis Desa Glagaharjo

Total jumlah penduduk Desa Glagaharjo per Juli 2020 adalah 3.899 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.909 jiwa, perempuan 1,990 jiwa dari 1.361 KK. Data sebaran penduduk di Desa Glagaharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Kependudukan Desa Glagaharjo (Update 2020)

NO	DUSUN	JUMLAH			
		KK	Jiwa	L	P
1	Kalitengah Lor	197	549	274	275
2	Kalitengah Kidul	106	336	170	166
3	Srunen	161	453	231	222
4	Singlar	136	388	195	193
5	Gading	98	278	136	142
6	Glagah Malang	90	271	135	136
7	Jetis Sumur	92	241	107	134
8	Ngancar	174	478	225	253
9	Banjarsari	158	457	205	252
10	Besalen	149	448	231	217
JUMLAH		1361	3899	1909	1990

Sumber: RPJMDes, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk per dusun memiliki jumlah yang beragam. Dusun Kalitengah Lor merupakan dusun dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 549 jiwa, sedangkan Dusun Jetis Sumur adalah dusun dengan jumlah penduduk terendah yaitu 241 jiwa.

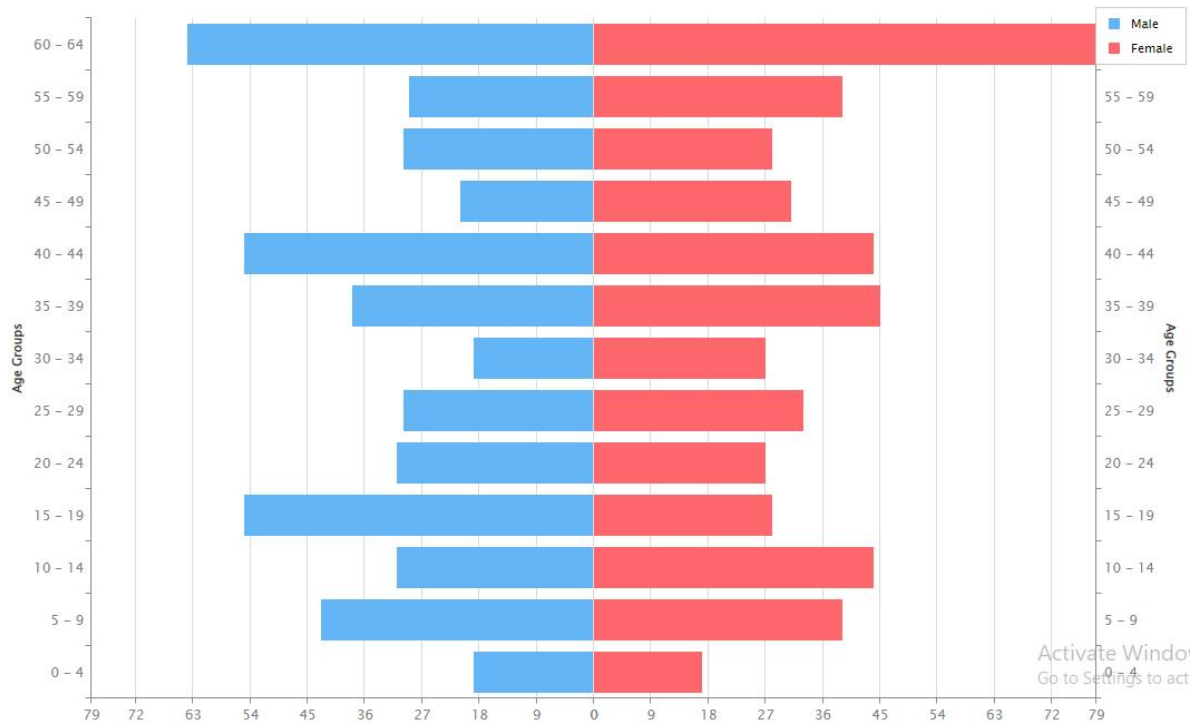
Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Umur (Update 2020)

NO	DUSUN	MENURUT KELOMPOK USIA											
		0 – 5 th		6 – 12 th		13 – 18 th		19 – 24 th		25 – 59 th		60 th keatas	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Besalen	3	6	24	29	34	20	28	12	117	109	34	50
2	Banjarsari	6	9	24	34	23	29	24	11	116	130	30	44
3	Ngancar	7	5	23	31	13	19	26	22	119	130	42	47
4	Glagahmalang	7	3	19	9	7	10	15	17	68	76	22	29
5	Jetis Sumur	7	3	9	14	6	7	14	11	57	64	21	37
6	Gading	4	5	9	16	13	10	9	10	69	70	31	33

7	Singlar	9	9	24	16	12	17	23	16	94	93	37	43
8	Srunen	8	2	23	30	24	19	31	22	111	112	39	38
9	Kalitengah kidul	6	2	22	20	16	16	21	11	87	87	27	31
10	Kalitengah lor	4	4	31	31	23	17	33	20	129	123	51	60
JUMLAH		61	48	208	230	171	164	224	152	967	994	334	412

Sumber: RPJMDes, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penduduk Desa Glagaharjo sebagian besar berada pada kelompok usia 25 – 59 tahun, sedangkan kelompok usia dengan jumlah terendah pada kelompok umur 0 – 5 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Glagaharjo didominasi oleh penduduk dengan usia produktif.



Gambar 4.3 Piramida Penduduk Desa Glagaharjo
Sumber: Kampungkb.bkkbn.go.id, 2020

Gambar 4.1 merupakan piramida penduduk yang menunjukkan bahwa Desa Glagaharjo memiliki penduduk terbanyak pada usia rentan yaitu pada umur 60 tahun keatas. Hal tersebut dapat meningkatkan kerentanan

masyarakat Desa Glagaharjo. Selain itu, jika dilihat secara keseluruhan, sesuai Tabel 4.4 sebagian besar penduduk Desa Glagaharjo didominasi pada umur produktif 25-59 tahun. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik oleh Desa Glagaharjo, justru dapat meningkatkan beban desa jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Oleh karena itu, sektor pendidikan dan pelatihan serta penyediaan lapangan pekerjaan perlu menjadi fokus dalam pengembangan Desa Glagaharjo.

Tabel 4.5 Data Penduduk Rentan Desa Glagaharjo (Update 2020)

NO	DUSUN	JUMLAH			
		Bumil	Balita	Lansia	Difabel
1	Kalitengah Lor	2	33	136	4
2	Kalitengah Kidul	0	27	63	12
3	Srunen	1	36	66	0
4	Singlar	3	38	79	4
5	Gading	3	22	64	2
6	Glagah Malang	0	20	83	1
7	Jetis Sumur	4	17	42	1
8	Ngancar	6	35	90	4
9	Banjarsari	2	35	84	5
10	Besalen	1	24	78	4
JUMLAH		22	287	785	37

Sumber: Dokumen Rencana Kontingensi, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan data terkait jumlah penduduk rentan (ibu hamil, balita, lansia dan difabel) yang berada di Desa Glagaharjo. Jumlah penduduk rentan berada pada kategori lansia yang berjumlah 785 jiwa, sehingga perlu peningkatan pelayanan dan sarana prasarana khusus bagi lansia untuk mengurangi kerentanan desa. Peran Puskesmas dan kader Posyandu menjadi kunci dalam menurunkan kerentanan penduduk rentan berkaitan dengan bidang Kesehatan.

4.1.4 Profil Sosial Ekonomi Desa Glagaharjo

Pendidikan merupakan simbol dari kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga dapat dikatakan bahwa orang dengan pendidikan tinggi

merupakan SDM yang memiliki kualitas baik. Berikut ini data bidang pendidikan penduduk Desa Glagaharjo pada tahun 2020:

Tabel 4.6 Data Penduduk Menurut Pendidikan (Update 2020)

NO	DUSUN	MENURUT PENDIDIKAN															
		Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		D1/D2		D3		S1		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Besalen	46	56	55	73	57	34	75	60	1	1	2	1	0	5	0	0
2	Banjarsari	45	69	56	68	41	32	78	74	0	1	0	3	7	5	0	1
3	Ngancar	45	54	84	94	37	43	66	55	0	2	0	4	2	3	0	0
4	Glagahmalang	33	23	24	38	28	26	45	42	1	1	3	4	7	7	0	0
5	Jetis Sumur	23	24	42	54	26	30	22	22	0	0	0	1	3	2	1	0
6	Gading	24	35	54	63	17	18	39	27	0	0	0	0	1	1	0	0
7	Singlar	49	57	66	70	44	38	38	27	0	1	0	0	1	2	0	0
8	Srunen	51	56	97	89	47	36	34	37	0	0	1	2	4	5	0	0
9	Kalitengah kidul	49	53	80	64	23	26	20	29	0	0	0	0	2	2	0	0
10	Kalitengah lor	10	10	12	11	27	20	16	19	0	0	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		465	533	682	726	347	303	433	392	2	6	6	15	28	32	1	1

Sumber: RPJMDes, 2020.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Glagaharjo memiliki tingkat pendidikan SD yaitu 682 penduduk laki-laki dan 726 penduduk perempuan. Kemudian disusul dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah yaitu 465 penduduk laki-laki dan 533 penduduk perempuan. Jika tidak ada peningkatan tingkat pendidikan pada masyarakat, maka hal tersebut turut meningkatkan tingkat kerentanan pada masyarakat Desa Glagaharjo.

Tabel 4.7 Data Penduduk Menurut Pekerjaan (Update 2020)

NO	DUSUN	MENURUT PEKERJAAN									
		Petani/Pekebun	Karyawan Swasta	Wiraswasta	Buruh Harian	Prangkat Desa	TNI/Polri	Perawat	PN S	Pensiunan	
1	Besalen	91	28	48	50	2	6	3	1	0	
2	Banjarsari	127	51	39	11	6	2	0	1	0	

3	Ngancar	169	43	32	14	1	3	1	3	0
4	Glagahmalang	72	26	19	1	1	0	2	2	1
5	Jetis Sumur	104	10	13	4	3	0	1	2	0
6	Gading	137	23	14	7	1	0	2	0	0
7	Singlar	172	21	15	9	1	0	0	1	0
8	Srunen	202	25	32	3	1	0	0	0	0
9	Kalitengah kidul	165	17	9	9	2	0	0	0	0
10	Kalitengah lor	295	9	7	12	1	0	0	0	0
JUMLAH		1534	253	228	120	19	11	9	10	1

Sumber: RPJMDes, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.7 pekerjaan penduduk Desa Glagaharjo didominasi dengan pekerjaan petani atau pekebun. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar Desa Glagaharjo adalah wilayah pertanian dengan tanah yang subur. Tidak ada kegiatan perindustrian yang masif pada kawasan Desa Glagaharjo membuat jumlah penduduk dengan pekerjaan karyawan, wiraswasta dan buruh tidak dominan.

Tabel 4.8 Data Penduduk Menurut Agama (Update 2020)

NO	DUSUN	MENURUT AGAMA									
		Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Besalen	238	224	0	0	2	2	0	0	0	0
2	Banjarsari	222	256	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Ngancar	234	251	2	2	0	0	0	0	0	0
4	Glagahmalang	138	144	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jetis Sumur	114	136	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gading	135	144	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Singlar	199	194	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Srunen	236	223	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kalitengah kidul	181	167	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalitengah lor	271	255	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1968	1994	2	2	3	3	0	0	0	0

Sumber: RPJMDes, 2020.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Glagaharjo adalah pemeluk agama islam, yaitu 1968 jiwa penduduk laki-laki dan 1994

jiwa penduduk perempuan. Tingkat toleransi yang baik pada penduduk Desa Glagaharjo membuat kondisi sosial di wilayah desa menjadi kondusif, ditunjukkan dengan tidak adanya konflik sosial yang terjadi.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data merupakan salah satu aspek keberhasilan penelitian, sehingga dalam pengumpulan data dibutuhkan teknik yang tepat agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat terhimpun. Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam proses penelitian, karena teknik akan mempermudah data terkumpul. Melalui pemikiran tersebut, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis terkait tingkah laku individu atau kelompok secara langsung di lapangan. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan sebagai data primer. Sedangkan untuk dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai data sekunder untuk mendukung serta melengkapi data primer (Sugiyono, 2018, p. 106-124). Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pada penelitian ini.

4.2.1 Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo

Setelah menentukan teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan seluruh data penelitian, baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan untuk menganalisis pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana yang berada di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan. Data primer dalam

penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan. Sementara itu, data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari sumber kedua dan bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder digunakan untuk memperkaya data supaya sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Dengan kata lain, data primer yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data sekunder (Samsu, 2017, p. 95).

4.2.1.1 Wawancara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman

Narasumber yang pertama adalah Bapak Haenry Dharma Widjaja selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Sleman. Latar belakang pendidikan beliau adalah S2 Magister Pendidikan. Sebelum ditempatkan di BPBD Sleman, beliau sempat ditempatkan di Dinas Pendidikan selama 24 tahun. Wawancara dilaksanakan di kantor BPBD Kabupaten Sleman pada tanggal 15 November 2021, beliau menyatakan informasi terkait penjelasan program Destana sebagai berikut:

Destana itu adalah suatu usaha peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi masyarakat dilatih tentang ancaman bencana, kerentanan yang ada, kita beri peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana. (Langkah-langkahnya) pertama mereka kita buat forum pengurangan risiko bencana, disitu ada kepengurusannya, kemudian mereka kita latih membuat rencana kontingensi, penanggulangan bencana, dan membuat SOP penanganan bencana. Di forum pengurangan risiko bencana itu kan ada beberapa bidang, ada bidang peringatan dini, data informasi, evakuasi, transportasi, kesehatan, logistik, keamanan, dll, mereka dilatih membuat SOP tiap-tiap bidang. Setelah itu, kita latih juga membuat peta kerentanan di daerah, kita sampaikan, kita diskusikan. Untuk rencana kontingensi itu untuk ancaman yang paling dominan di daerah tersebut, misalnya kalau daerah lereng Merapi ya ancamannya erupsi Merapi, nanti disana ada matriks untuk penilaian risiko. Jadi ada ancaman, dampaknya, dan ada nilainya, nilai yang paling besar itu yang paling dominan. Kemudian membuat rencana kontingensi penanggulangan bencana tersebut, ada dokumen RPB

dan RenKon (Rencana Kontingensi). Terakhir, mereka kita kukuhkan dengan mengadakan simulasi Gladi Lapang, lalu dibentuk menjadi desa tangguh bencana (Destana).

Provinsi memberikan anggaran dalam pelaksanaan program destana ini, namun ketika pandemi Covid-19 muncul, anggaran pelaksanaan program destana ini sempat dipotong akibat adanya *refocussing*.

Pihak BPBD Sleman menjelaskan berbagai macam usaha mitigasi yang bertujuan untuk mendukung program Destana, yaitu sebagai berikut:

Langkah mitigasinya kita menginformasikan informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat. Jadi, di BPBD itu ada Pusdalop (Pusat Pengendali Operasi), disana sering menerima informasi dari BPPTKG terkait kondisi Merapi bagaimana, ada guguran, akan terjadi letusan, luncuran lava berapa kilometer, dll itu selalu kita informasi ke masyarakat. Ada WA, Twitter, dan ada HT. Kemudian, kita juga memasang EWS di tempat-tempat yang strategis untuk mengetahui ancaman, disana EWS itu ada perangkat CCTV, sekitar ancaman ada erupsi Merapi, banjir lahar hujan, ada yang ke sungai, jembatan, jadi semua titik rentan itu kita kasih EWS dengan kamera yang tersambung dengan Pusdalop, ada sirine untuk warga sekitar agar bisa segera evakuasi. Serta mitigasi fisik lainnya yaitu kita memasang rambu-rambu jalur evakuasi, peringatan KRB 1, 2, 3. Kemudian kita perbaiki jalur evakuasi yang rusak-rusak, walaupun itu bertahap kita tangani dengan kekuatan yang cor beton. Karena daerah KRB 3 itu kan tidak boleh ada pembangunan, ketentuannya KRB 3 itu dikosongkan, tidak boleh dibangun, tapi disana kan ada wisatawan, ada orang yang sering merumpuk disana lewatnya jalur itu, kemudian nanti kalo ada ancaman dan jalurnya rusak kan rentan, tidak bisa evakuasi cepat, maka untuk pembangunan dengan alasan mitigasi itu masih dibolehkan.

Pihak BPBD Sleman juga turut aktif memberikan pelatihan kepada para relawan dan masyarakat di desa tangguh bencana untuk menunjang program tersebut, berikut pernyataannya:

Pihak BPBD Sleman sendiri turut aktif memberikan pelatihan relawan, misalnya pelatihan pertolongan pertama, pelatihan dapur umum, pelatihan SAR, pelatihan pertukangan, pelatihan evakuasi medis, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk komunitas relawan. Kami untuk melatih tidak khusus di Destana, tapi kami memang komprehensif seluruh Kabupaten Sleman, termasuk juga Destana.

Dalam menunjang pelaksanaan program Destana, pihak BPBD Kabupaten Sleman turut menggandeng berbagai macam komunitas kebencanaan dan membentuk desa penyangga atau disebut *Sister Village*, berikut pernyataannya:

Kita sering mengadakan kerjasama dengan pihak komunitas baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun lalu, kita membuat rencana kontingensi untuk perencanaan erupsi Merapi bekerjasama dengan UNICEF. Kemudian disini ada lembaga-lembaga nonpemerintah, ada LSM, ada Emergency Service, KIPA, LINGKAR. Dari akademisi kita sering membuat analisis risiko dampak bencana kita mendatangkan akademisi, kadang dari UGM, UPN, sesuai dengan kompetensi mereka. Kalau dengan dunia usaha, sering juga, misalnya kemarin kita koordinasi dengan PLN untuk pengadaan penanganan Covid, dengan CSR perusahaan-perusahaan di Sleman sering pengadaan logistik. Dengan kementerian lembaga sering juga, dalam negeri. Kemudian dengan BPBD DIY, BNPB tentunya. Dengan PERS juga, membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang penanganan bencana.

Jadi *Sister Village* itu sebenarnya Persaudaraan Desa, dimana mereka mengadakan kerjasama, apabila desa yang terdampak harus evakuasi karena ancaman bencana, mereka evakuasi ke desa tetangga. Mereka sudah mengadakan MoU, nanti jaraknya dimana, mengungsinya berapa orang, biayanya bagaimana, logistiknya bagaimana, sarana di pengungsian apa saja, untuk makan minum sandang dll itu bisa terpenuhi dengan ini.

Kepala BPBD Sleman turut memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program destana di Kabupaten Sleman, berikut ini pernyataannya:

Kendala itu pasti ada ya. Dalam pembentukan itu dari sisi kepesertaan kan harus dari beberapa komponen masyarakat, ada pamong desa, kelompok tani, kelompok PKK, Karang Taruna, Linmas, relawan, dll itu banyak. (Kendalanya yaitu) terkadang pada saat kita mengadakan pelatihan, mereka juga punya prosesi sendiri-sendiri, waktunya sulit bertemu. Kalau kita mengadakan siang hari, maka yang punya pekerjaan siang hari tidak bisa ikut, begitupun jika malam. Tapi itu tetap bisa diatasi. Kemudian ada yang pernah menolak menerima program, biasanya karena mereka sibuk, dengan dalih tertentu, misalnya ada pilihan lurah, padahal sudah kita anggarkan

untuk desa itu, akhirnya kita harus pindah ke desa lain. Kendala anggaran juga ada, misalnya tahun 2020 sudah dianggarkan 8 desa, tapi karena ada *refocusing*, akhirnya hanya 2 desa.

4.2.1.2 Wawancara Kepala Kecamatan Cangkringan

Narasumber yang kedua adalah perwakilan dari pihak Kecamatan Cangkringan yang diwakili oleh Bapak Tresno Riyanto, S.P. selaku Sekretaris Panewu Cangkringan. Wawancara dilaksanakan di kantor kecamatan Cangkringan pada tanggal 18 November 2021, beliau menyatakan informasi terkait penjelasan program Destana sebagai berikut:

Kecamatan Cangkringan termasuk kawasan rawan bencana, sehingga kecamatan telah menganggarkan dana untuk kegiatan pengurangan risiko bencana. Dana itu digunakan untuk menunjang pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di seluruh desa di Kecamatan Cangkringan. Di Kecamatan Cangkringan ada 5 desa, Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo, Wukisari dan Argomulyo. Semua desa sudah menjalankan program Destana. Dari kelima desa itu kerusakan paling parah di Desa Glagaharjo.

Pihak kecamatan tidak memiliki program khusus terkait kebencanaan, semua program berkaitan dengan pengelolaan kebencanaan dibuat sendiri oleh pihak desa menyesuaikan kondisi desa masing-masing. Pihak kecamatan hanya sebagai koordinator saja dan mengawasi penggunaan anggaran kebencanaan di desa.

Setiap desa di Kecamatan Cangkringan telah memiliki komunitas kebencanaan masing-masing. Nama komunitas relawan di Desa Glagaharjo yaitu Komunitas Siaga Merapi (KSM) yang diketuai oleh Bapak Rambat Wahidi.

4.2.1.3 Wawancara Kepala Desa Glagaharjo

Narasumber yang ketiga adalah Bapak Joko Purwanto selaku Carik Desa Glagaharjo. Latar belakang pendidikan beliau adalah SMK dan bertempat tinggal di dusun Banjarsari. Wawancara dilaksanakan di kantor BPBD Kabupaten Sleman pada tanggal 25 November 2021, beliau menjelaskan bahwa program Destana di Desa Glagaharjo pertama kali

dilaksanakan pada tahun 2015 dimulai dengan melaksanakan penyusunan dokumen mitigasi bencana. Berkaitan dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana), Carik Desa Glagaharjo menyampaikan informasi sebagai berikut:

Desa Glagaharjo memiliki fasilitas pendidikan formal PAUD, TK dan SD yang sudah terintegrasi dengan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Terdapat pula program *Sister School*, yaitu program dimana sekolah bisa saling membantu jika salah satu sekolah terkena bencana. Pemerintah Desa tidak ikut campur tentang pembelajaran disekolah, kami hanya membantu memberikan insentif tambahan bagi para tenaga pendidiknya. Tapi sejak Covid ini untuk yang itu kami stop dulu. Kalau fasilitas pemerintah desa fokus ke PAUD, sedangkan TK dan SD sudah dikelola dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan informasi dari bapak Carik, Desa Glagaharjo juga memiliki 1 Puskesmas pembantu, posyandu untuk balita dan lansia serta polindes. Desa terus memantau dan mengevaluasi posyandu karena itu salah satu program utama kesehatan desa. Berkaitan dengan sarana prasaran transportasi, di wilayah Desa Glagaharjo tidak ada kendaraan umum, semua masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadi. Untuk menunjang sarpras transportasi, desa memiliki 2 jalur transportasi dan 10 unit jembatan. Desa Glagaharjo juga memiliki beberapa sarana publik, seperti lapangan, gedung aula, dan perpustakaan desa yang dapat diakses siapa saja.

Berkaitan dengan sistem informasi, Desa Glagaharjo memiliki situs *website* resmi yang dapat diakses, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, untuk menyebarkan informasi kepada warga desa, pemerintah desa memanfaatkan media sosial berupa grup Whatsapp dan Instagram. Setiap 1 KK di desa Glagaharjo telah memiliki minimal 1 *handphone*, sehingga penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi dinilai efektif. Tata kelola pemerintahan di Desa Glagaharjo juga telah

disesuaikan dengan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Namun dalam pelaksanaannya tetap ada beberapa pengurus yang jobdesk nya tumpang tindih. Hal tersebut dapat terjadi karena pengurus tersebut masih terbawa budaya lama yang tidak sesuai. Kedepan akan kami arahkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan SDA, Pemerintah Desa Glagaharjo telah melaksanakan program pembentukan kelompok wanita tani untuk mendukung pengelolaan pertanian. Desa juga terus memantau dan memelihara secara kontinyu sumber mata air di kawasan desa, karena mata air sudah menjadi hajat masyarakat desa. Berkaitan dengan penambangan pasir yang dapat mengancam kelestarian lingkungan, pemerintah desa tidak bisa ikut campur karena hal tersebut telah menjadi wewenang dari dinas SDM.

Kebudayaan di Desa Glagaharjo masih beragam, masih terdapat kegiatan yang mengangkat kesenian ketoprak, jathilan, campurasi dan lain-lain. Kegiatan spiritual seperti pengajian dan kendurian juga masih banyak. Setiap tahun pemerintah desa memberikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Pemerintah desa mencoba terus mendorong setiap dusun untuk terus melestarikan kebudayaannya. Berkaitan dengan perlindungan keamanan masyarakat, desa memiliki Linmas dan kelompok relawan kebencanaan Komunitas Siaga Merapi (KSM). Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat baik Linmas dan KSM saling berkoordinasi dengan Babinsa/Babinkamtibmas.

Desa Glagaharjo memiliki dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi untuk mendukung upaya pengelolaan risiko bencana. Dengan dokumen rencana kontingensi ini, pemerintah desa dapat menjadi lebih siap dalam menghadapi kondisi darurat menjadi. Strategi dan program yang ada di dokumen rencana kontingensi sudah dimasukkan dan menjadi rujukan dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Desa Glagaharjo, sehingga pelaksanaan rencana kontingensi tersebut mendapatkan dana operasional. Desa Glagaharjo juga melakukan kerjasama dengan desa tetangga berupa program *Sister Village*, dimana ketika warga Desa Glagaharjo terancam bencana dapat mengungsi ke desa tetangga tersebut. Ada 2 desa yang telah sepakat bekerjasama, yaitu Desa Argomulyo dan Desa Sindumartani, sehingga Desa Glagaharjo turut melakukan penyelarasan rencana penanggulangan bencana dengan kedua desa tersebut.

Pemerintah Desa telah melaksanakan pengkajian risiko bencana, dari 10 dusun yang ada di Desa Glagaharjo terdapat 3 dusun yang termasuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Pemukiman yang berada di sekitar bantaran sungai gendol juga memiliki risiko bencana yang tinggi akibat ancaman banjir lahar dingin. Hasil kajian risiko bencana ini dicantumkan kedalam dokumen rencana kontingensi. Hasil kajian ini dalam praktiknya digunakan untuk dasar dalam menyusun program pembangunan desa.

Dalam kegiatan pengelolaan risiko bencana, pemerintah desa dibantu oleh BPBD Sleman, Lembaga Red-R dan juga FKKRS (Forum Komunikasi Kelompok Relawan Sleman). Dukungan lembaga dari luar desa tersebut dapat memberikan peningkatan jumlah anggaran kegiatan PRB. Desa Glagaharjo sendiri sudah memiliki forum PRB sendiri yang diwadahi oleh UnitLak (Unit Pelaksana) Kebencanaan.

4.2.1.4 Wawancara Kepala Dusun Kalitengah Lor

Narasumber yang keempat adalah Bapak Suwondo selaku Kepala Dusun Kalitengah Lor. Wawancara dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Suwondo yang dilaksanakan pada 29 November 2021. Terkait program Destana di Desa Glagaharjo, beliau memberikan informasi sebagai berikut:

Terkait pengelolaan Risiko bencana oleh masyarakat, Itu memang pengelolaannya sebetulnya kita sebelum 2010 sudah punya, kalau dulu namanya tim evakuasi. Tahun 2009 sudah kita bentuk, selang 1 tahun terpakai. Setelah 2010 itu kita ganti nama menjadi PRB, Pengurangan Risiko Bencana. Di dalam Lembaga itu termasuk anggotanya sekitar 80, itu sudah dibagi-bagi tugasnya. Jadi, si A si B itu sudah diberi tugas sendiri-sendiri. Misalnya, ada yang pendataan mengurus lansia, kelompok rentan, ada yang pendataan hewan, ada yang pendataan seluruh warga, begitu. Terus itu sudah dibuat SOP, skenarionya itu sudah dibuat. Jadi ini jalur evakuasinya, trus kalau terjadi itu titik kumpulnya disini, larinya kesini, berhentinya disini, itu sudah dibuat semua.

Berkaitan dengan informasi arahan untuk mengungsi tidak sembarang kabar kita terima, harus resmi dari BPBK, BPBD, Bupati, Kecamatan Desa, langsung pak Dukuh. Kita nunggu itu aja. Kalau cuma kabar-kabar yang belum pasti *nggak* bisa kita terima. Informasi yang resmi itu lalu kita sebarkan ke warga, melalui grup-grup WA. Ada grup per RT, ada grup PKK, dst. Itu kan sudah menjangkau ke semuanya. Misalnya ada kabar yang akurat kita kumpulkan tim tadi, yang 80 orang tadi, untuk koordinasi.

Berkaitan dengan teknik evakuasi warga untuk mengungsi, bapak Sukatmin menjelaskan bahwa sudah ada SOP nya yang akan diarahkan ke Barak Banaran di Desa Argomulyo. Namun tahun 2019-2020 kemarin, karena yang diberi rekomendasi untuk mengungsi hanya dusun Kalitengah Lor, maka warga cukup dievakuasi ke Barak Desa Glagaharjo yang kira-kira jaraknya 5 kilometer dari dusun. Bapak Sukatmin juga menjelaskan bahwa ketika mengungsi, disaat yang sama sedang terjadi pandemi Covid-19. Kegiatan pengungsian pun menyesuaikan kondisi yang ada, tidak seperti pengungsian tahun 2010 lalu. Contohnya adalah pembatasan kapasitas, semisal penyekatan setiap keluarga untuk tidak asal berkumpul dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap ada kegiatan menyusun SOP yang akan dimasukkan ke dalam dokumen rencana kontingensi, setiap Kepala Dusun selalu diundang untuk ikut menyusun dan menyampaikan aspirasinya.

Bapak Sukatmin juga menjelaskan permasalahan terkait evakuasi hewan ternak ketika terjadi bencana yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan sebagian warga, berikut ini rincian informasinya:

Kalau sebelum 2010, kita untuk menghadapi masyarakat awam seperti ini agak kesulitan. Jadi, kita dicaci maki setelah 2006 itu. Tapi setelah 2010 itu sudah mudah mas. Kalau hewan itu karna sudah ada tim evakuasi khusus hewan, itu juga kita rembug, terus nanti tentang pelaksanaannya kalau misalnya armada-armada disini kurang ya kita ke Kecamatan, BPBD, tapi kalau disini cukup ya tidak perlu. Yang jelas dari swadaya masyarakat itu ada transportasi, misalnya mobil, motor itu kan sudah punya. Jadi semua KK sudah punya motor. Nah kalau yang belum punya itu nanti dirembug, kamu bawa sana, kamu bawa sana. Yang punya mobil bisa dirembug bareng-bareng. Untuk evakuasi ternak sudah ada truk, armada, *gajlukan*, untuk menaikkan sapinya atau hewannya pake *gajlukan* dari besi biar cepat.

Yang sekarang sudah terpikirkan tapi belum ada pelaksanaan itu kandang ternak mas. Maksudnya, kandang yang standar mas. Kalau untuk shelter kandangnya itu sudah ada, sudah disiapkan, tapi yang standar belum. Misalnya, kandang sapi potong bentuknya seperti ini, sapi perah seperti ini kan belum. Kalau sapi potong itu asal ada tempat makan, tempat minum, itu sudah cukup. Kalau sapi perah itu yang repot, karena kalau memenuhi standar agak susah. Jadi (yang standar itu) kita misalnya punya sapi 50, disitu nanti kita tidak usah membagikan minuman, karena sudah ada alatnya (yang mengalirkan minuman). Trus nanti misalnya airnya berkurang sudah otomatis bertambah sendiri.

4.2.1.5 Wawancara Kepala Dusun Srunen

Narasumber yang kelima adalah Bapak Sukatmin selaku Kepala Dusun Srunen. Wawancara dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Sukatmin yang dilaksanakan pada 3 Desember 2021. Terkait pengelolaan risiko erupsi Merapi, warga dusun Srunen sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi, seperti yang dijelaskan pada rincian wawancara berikut:

Kita pengalaman dengan adanya erupsi Merapi, kan tidak hanya tahun 2010, (sejak) tahun 1994 saya sudah mengalami hal itu. Tapi yang sangat (membuat) sadar itu setelah kejadian 2010 itu. Jadi kalau dulu-dulunya, masyarakat kami itu istilahnya pas keadaan

Merapi aktif itu malah melihat-lihat. Tapi setelah 2010, mereka sadar bahwa keadaan seperti itu membahayakan. Kalau tentang cara pengurangan risiko itu ada semacam PRB nya mas. Kita bikin SOP. Diantaranya untuk dikatakan tangguh bencana yang jelas ada antisipasi menghadapi Merapi bila meletus, itu sudah ada (caranya) secara kepengurusan begitu, yang bentuknya SOP tadi. Ada seksi evakuasi, pendataan, aset-aset warga, surat-surat berharga, kendaraan, sapi, dsb, disana sudah ada mas.

Berkaitan dengan pengungsian, Kalau kemarin yang Kalitengah Lor itu di samping balai desa. Tapi itu khusus untuk dusun Kalitengah Lor, karena kemarin yang direkomendasikan mengungsi hanya Kalitengah Lor, yang lain hanya siaga. Untuk saat ini imbuhan dari pemerintah kan 3 kilo dari puncak yang harus dikosongkan, sudah sejak dulu (akhir 2019) sejak status Merapi naik siaga. Kalau warga Dusun Srunen diarahkan ke Barak Sindumartani.

Bapak Sukatmin juga menjelaskan bahwa di Dusun Srunen terdapat Tower EWS yang memberikan peringatan kepada warga jika terjadi kondisi gawat darurat. Sebagian besar warga juga memiliki radio frekuensi HT untuk saling berbagi informasi jika ada kondisi darurat seperti banjir erupsi Merapi. Sebenarnya juga terdapat media lain, seperti media sosial Grup Whatsapp, namun terkadang di kawasan Dusun Srunen susah sinyal. Bapak Sukatmin juga menjelaskan bahwa sudah ada pelatihan kebencanaan yang diberikan kepada warga Dusun Srunen, berikut ini rincian informasi yang diberikan:

Kalau pelatihan, berulang kali sudah pernah ada mas. Dulu sehabis erupsi Merapi, ada pelatihan tingkat dusun. Bahkan terakhir itu sampai (misalnya) kalau kerja di ladang, pakai kartu cetel (sebagai tanda sedang ke ladang). Misalnya yang ke ladang belum pulang kan kartunya masih disitu, jadi mudah melacaknya. Sudah pada punya (kartunya) beberapa, tapi belum dipraktikkan. Pelatihan yang diberikan biasanya tentang bahaya letusan Merapi itu bagaimana, macam-macam bahayanya. Terkait kesiapsiagaan bagaimana mengevakuasi, melihat saudara/tetangga yang terluka itu diajari dan dipraktikkan, ada pertolongan pertama.

Berkaitan dengan komunitas, Bapak Sukatmin menjelaskan bahwa komunitas kebencanaan yang aktif di desa adalah Komunitas Siaga Merapi (KSM) yang bekerja sama dengan setiap dusun, dan beberapa warga dusun

Srunen pun juga menjadi bagian dari anggota KSM. Bila terjadi bencana, keberadaan KSM sangat membantu masyarakat dalam mengkoordinasikan kegiatan evakuasi dan membantu menyiapkan tempat pengungsian. Bapak Sukatmin menyampaikan, permasalahan yang hingga saat ini masih dialami oleh warga adalah terkait pengelolaan ternak ketika sedang mengungsi, berikut ini informasi yang diberikan:

Kalau penanganan warga tidak ada masalah mas, yang jadi masalah itu misalnya kalau Merapi erupsi kendala utamanya pengelolaan hewan ternak. Sampai saat ini belum ada barak hewan, bahkan kami sudah mengusulkan tempat khusus untuk evakuasi ternak, namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Kalau jiwanya kan mudah, tapi kalau hewannya tidak bersamaan dengan pemeliharannya kan jadi susah. Jadi harus naik turun, istilahnya. Menurut saya yang sangat mendesak ya berkaitan dengan evakuasi ternak yang belum ada. Bagi warga, hewan itu adalah salah satu tabungan keluarga, misalnya ditinggal ngungsi tapi hewannya mati disini kan pasti sedih.

4.2.1.6 Wawancara Ketua Komunitas Siaga Merapi (KSM)

Narasumber yang ketujuh adalah Bapak Rambat Wahidi selaku Ketua Kelompok Siaga Merapi. Wawancara dilaksanakan di Balai Desa Glagajarjo yang dilaksanakan pada 10 Desember 2021. Bapak Rambat menjelaskan bahwa komunitas relawan KSM dibentuk setelah erupsi Gunung Merapi 2010, tepatnya tanggal 5 Juni 2011 atas inisiasi warga yang peduli terhadap mitigasi bencana. KSM bergerak pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial-kemanusiaan, khususnya mitigasi Merapi. KSM merupakan lembaga nonformal yang sudah dilegalkan oleh SK dari Pemerintah Desa Glagaharjo agar dapat mendapatkan akses bantuan dana. KSM saat ini anggota nya didominasi oleh warga Desa Glagaharjo yang berumur dewasa hingga paruh baya, belum begitu banyak anak muda yang tertarik bergabung dengan KSM. Pada tingkat desa, KSM bekerjasama dengan Linmas, PKK, Karang Taruna dan Unitlak PRB Desa.

Program kerja rutin dari KSM adalah pelatihan mitigasi bencana dan sosialisasi kepada warga terkait keadaan Merapi. Selain itu jika ada kecelakaan, pohon tumbang, kecelakaan tambang atau sejenisnya KSM turut ikut membantu. Termasuk pada pandemi Covid-19 kemarin, KSM turut membantu dengan membentuk tim pencegahan Covid-19 dan sudah memiliki posko di depan balai desa. Selain pelatihan mitigasi bencana, KSM juga memberikan Pelatihan PPGD (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat), SAR Darat dan sebagainya kepada setiap anggota dan warga yang tertarik untuk ikut. KSM juga aktif bekerjasama dengan komunitas kebencanaan dari desa tetangga, seperti bekerja sama dengan Argomulyo Merapi Center (AMC) dari desa Argomulyo.

KSM dibekali dengan sarana prasarana berupa Ambulan 2 unit, posko pemantauan merapi, posko pencegahan Covid-19 di kantor kelurahan dan berbagai macam alat evakuasi seperti gergaji mesin dan sebagainya. KSM juga memiliki posko pemantauan merapi di wilayah objek wisata, seperti di Teras Merapi dan Bukit Klagon. Di setiap posko pemantauan merapi terdapat seismograf, jika terdapat bahaya darurat maka disebarkan melalui HT dan dinyalakan sirine peringatan bagi warga untuk mengevakuasi diri. Kegiatan terkait peringatan dini juga telah dimasukkan ke dalam rencana kontingensi dan dapat diaktifkan ketika terjadi keadaan darurat. Untuk menunjang keterlaksanaan pengelolaan bencana di desa, tim PRB desa dan KSM pernah mendapatkan pelatihan dari pihak BPBD Sleman dan PMI Sleman, namun belum dilaksanakan secara rutin.

Setiap tahun, selalu ada program peningkatan kapasitas bagi para anggota KSM yang juga merupakan program kerja KSM sendiri yang dibantu oleh pihak BPBD Sleman. Kendala yang dialami oleh KSM saat ini adalah di posko pemantauan merapi belum memiliki CCTV yang memantau secara dekat aktivitas Gunung Merapi, KSM hanya mengandalkan pendengaran dan penglihatan secara langsung menggunakan teropong. Berkaitan dengan

dana operasional dari desa tidak ada kendala, dalam berkegiatan, jika KSM kekurangan kapasitas, mereka dapat menghubungi BPBD Sleman untuk meminta bantuan dengan cukup melaporkan saja. Sebelumnya Desa Glagaharjo belum melaksanakan kegiatan pelatihan kesiapsiagaan secara rutin, hanya pernah diadakan saja. Namun sejak 2020 disusun rancangan kegiatan pelatihan rutin kebencanaan yang dimasukkan ke dalam dokumen RPJM Desa Glagaharjo. Rencana kegiatan pelatihan akan mengadakan simulasi evakuasi, namun tidak sampai mengajak simulasi bersama dengan desa tetangga.

Desa Glagaharjo belum memiliki peta evakuasi secara fisik, hanya sebatas catatan dalam bentuk tulisan saja. Desa Glagaharjo telah memiliki beberapa tempat evakuasi bagi warganya baik yang berada di kawasan desa maupun di desa tetangga. Di kawasan Desa Glagaharjo, terdapat Gedung Aula dan barak desa sebagai tempat evakuasi. Di desa tetangga, terdapat barak Gayam di Desa Argomulyo dan Barak Koripan di Desa Sindumartani yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi warga Desa Glagaharjo. Untuk menunjang kegiatan evakuasi tersebut, desa punya 2 jalur evakuasi utama. 1 jalur poros desa dan 1 jalur perbatasan yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Di setiap jalan dan kawasan pedesaan yang berada di kawasan rawan bencana telah terdapat rambu-rambu evakuasi, titik kumpul dan peringatan rawan bencana.

Berkaitan dengan penilaian risiko bencana, desa telah melakukan penilaian ancaman, penilaian kerentanan dan pengkajian kapasitas. Tempat paling berisiko berada di tempat wisata teras merapi dan bukit klangon. Namun berkaitan dengan mekanisme upaya pemulihan dini bencana, penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana masih di bantu oleh BPBD. Desa hingga saat ini hanya mengelola pengelolaan bantuan pemulihan dini bencananya saja. Semisal kemarin ketika pengungsian erupsi Merapi, pengelolaan dana dilakukan oleh UnitLak kebencanaan dan dibawah

pengelolaan desa. Pasca erupsi 2010 lalu, banyak warga yang rumahnya hancur, sehingga harus dipindahkan ke hunian tetap (huntap) yang dibiayai oleh BNPB. Terdapat 3 huntap, yaitu Huntap Banjarsari, Huntap Gading dan Huntap Jetis Sumur. Huntap-huntap tersebut diisi oleh warga dari Dusun Singlar, Glagah Malang, Ngancang dan Besalen.

4.2.1.7 Studi Dokumen Pemerintah Desa Glagaharjo

Pada kegiatan studi dokumen terdapat 2 dokumen yang menjadi bahan acuan untuk melaksanakan studi dokumentasi, yaitu dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Desa Glagaharjo dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Glagaharjo. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan Pemerintah Desa Glagaharjo dalam melaksanakan penanggulangan bencana di kawasan desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa Glagaharjo, arah kebijakan pembangunan desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap RT di masing-masing dusun di Desa Glagaharjo. Dokumen RPJM ini juga berisi penganggaran kegiatan penanggulangan bencana di desa baik untuk kegiatan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi berisi tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat bagi para pelaku/pemangku kepentingan. Dengan demikian saat situasi darurat para pelaku/pemangku kepentingan yang ada di desa dapat melaksanakan peran, tugas dan fungsi masing-masing dalam kegiatan tanggap darurat, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih terpadu dan terkoordinir. Diharapkan dokumen rencana kontingensi ini dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

4.2.1.8 Studi Observasi Desa Glagaharjo

Pada kegiatan observasi, peneliti melaksanakan observasi terkait sarana prasarana yang terdapat di Desa Glagaharjo secara riil di lapangan. Berdasarkan kegiatan observasi, peneliti menemukan beberapa sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 4.9 Studi Observasi Desa Glagaharjo

No	Aspek Sarana/Prasarana	Temuan di Lapangan	
1	Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal	PAUD	1) PAUD Arimbi, 2) PAUD Bunga Persada, 3) PAUD Sadewa, 4) PAUD Bina Anak Sarana Mandiri, 5) PAUD Uswatun Hasanah, 6) PAUD Aisyah Besalen
		TK	1) TK ABA Cepitsari, 2) TK Bina Anak Sarana Mandiri, 3) TK Puspitasari
		SD	1) SD N Glagaharjo, 2) SD Muhammadiyah Cepitsari, 3) SD N Srunen
		Non formal	Taman Pendidikan Al`quran
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1) Gedung Puskesmas Pembantu 2) Pusat Posyandu dan Polindes disetiap dusun 3) 10 Unit Sarana Air Bersih berupa Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)	
3	Fasilitas Sarana Prasarana	1) 2 ruas jalur utama, yaitu 1 ruas jalur poros desa dan 1 ruas jalur perbatasan dengan	

No	Aspek Sarana/Prasarana	Temuan di Lapangan
	Transportasi	Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 2) 12 Unit Jembatan
4	Fasilitas Layanan Publik dan Sistem Informasi	1) Gedung pemerintahan Desa Glagaharjo 2) Situs <i>website</i> resmi Desa Glagaharjo 3) Sosial media resmi Desa Glagaharjo (Whatsapp dan Instagram) 4) Radio frekuensi HT (bagi pemangku kepentingan keamanan dan kebencanaan)
5	Fasilitas Budaya, Spiritual dan Pariwisata	1) Gedung aula 2) Gedung Sendra tari dan kesenian 3) Lapangan 4) Masjid 3 Unit 5) Mushala 10 Unit 6) Wisata Teras Merapi 7) Wisata Bukit Klangon 8) Pasar desa
6	Fasilitas Keamanan dan Pengurangan Risiko Bencana	1) Posko Covid-19 2 unit 2) Posko Utama PPKM Covid-19 1 unit 3) Posko KSM 1 unit 4) Posko Pemantaun Gunung Merapi 5 unit 5) Posko jaga relawan 1 unit 6) Ambulan 2 unit 7) Hunian Tetap (Huntap) 3 unit 8) Barak Pengungsian 1 unit 9) Barak ternak 1 unit 10) Alat evakuasi (gergaji mesin, dll)

No	Aspek Sarana/Prasarana	Temuan di Lapangan
		11) Tower <i>Early Warning System</i> (EWS) 12) Sirine peringatan dini
7	Fasilitas Jalur dan Rambu Evakuasi Bencana	1) Rambu arah jalur evakuasi ancaman erupsi Merapi 2) Rambu peringatan kawasan rawan bencana erupsi Merapi 3) Rambu peringatan kawasan bahaya awan panas dan lahar dingin 4) Rambu titik kumpul sementara 5) Rambu kawasan wajib pakai masker

4.2.2 Implikasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Untuk menyajikan data hasil penelitian sesuai dengan aspek implikasi pengurangan risiko bencana berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman, peneliti menggunakan hasil pengumpulan data yang telah dijabarkan dalam subbab 4.2.1 serta studi dokumen yang berasal dari Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diterbitkan oleh BNPB tahun 2015. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan ketahanan wilayah yang berkorelasi dengan penurunan risiko bencana. Seluruh indikator IKD terbagi menjadi 7 prioritas yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.10 Susunan Prioritas dalam Penilaian Ketahanan Wilayah
Prioritas 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

--

<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana • Indikator 2: Pembentukan BPBD • Indikator 3: Tentang Pembentukan Forum PRB • Indikator 4: Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan • Indikator 5: Kebijakan Daerah tentang PRB • Indikator 6: Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB • Indikator 7: Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Indikator 8: Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana • Indikator 9: Komitmen DPRD terhadap PRB
<p>Prioritas 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 10: Peta Bahaya dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah • Indikator 11: Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah • Indikator 12: Peta Kapasitas dan Kajiannya • Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana
<p>Prioritas 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 14: Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Yang Menjangkau Langsung Masyarakat • Indikator 15: Sosialisasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Pada Tiap-Tiap Kecamatan Di Wilayahnya • Indikator 16: Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Minimal Beranggotakan Lembaga-Lembaga Dari Sektor Pemerintah, Masyarakat Maupun Dunia Usaha • Indikator 17: Pusdalops PB Dengan Fasilitas Minimal Mampu Memberikan Respon Efektif untuk Pelaksanaan Peringatan Dini Dan Penanganan Masa Krisis

<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 18: Sistem Pendataan Bencana Yang Terhubung Dengan Sistem Pendataan Bencana Nasional • Indikator 19: Pelatihan Dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB • Indikator 20: Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan • Indikator 21: Kajian Kebutuhan Peralatan Dan Logistik Kebencanaan • Indikator 22: Pengadaan Kebutuhan Peralatan Dan Logistik Kebencanaan • Indikator 23: Penyimpanan/Pergudangan Logistik PB • Indikator 24: Pemeliharaan Peralatan Dan Supply Chain Logistik Yang Diselenggarakan Secara Periodik • Indikator 25: Tersedianya Energi Listrik untuk Kebutuhan Darurat • Indikator 26: Kemampuan Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kebutuhan Darurat
<p>Prioritas 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 27: Penataan Ruang Berbasis PRB • Indikator 28: Informasi Penataan Ruang Yang Mudah Diakses Publik • Indikator 29: Sekolah Dan Madrasah Aman Bencana • Indikator 30: Rumah Sakit Aman Bencana Dan Puskesmas Aman Bencana • Indikator 31: Desa Tangguh Bencana
<p>Prioritas 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 32: Penerapan Resapan Air untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Banjir • Indikator 33: Perlindungan Daerah Tangkapan Air • Indikator 34: Restorasi Sungai • Indikator 35: Penguatan Lereng • Indikator 36: Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas

Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan

- Indikator 37: Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan
- Indikator 38: Pemantauan Berkala Hulu Sungai
- Indikator 39: Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
- Indikator 40: Tanaman Dan/Atau Bangunan Penahan Gelombang Tsunami
- Indikator 41: Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk Dan Taman Kota
- Indikator 42: Restorasi Lahan Gambut
- Indikator 43: Konservasi Vegetatif DAS Rawan Longsor

Prioritas 6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Pengangan Darurat Bencana

- Indikator 44: Rencana Kontijensi Gempabumi
- Indikator 45: Rencana Kontijensi Tsunami
- Indikator 46: Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
- Indikator 47: Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
- Indikator 48: Rencana Kontijensi Banjir
- Indikator 49: Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
- Indikator 50: Rencana Kontijensi Tanah Longsor
- Indikator 51: Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
- Indikator 52: Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan
- Indikator 53: Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
- Indikator 54: Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi
- Indikator 55: Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi
- Indikator 56: Infrastruktur Evakuasi Bencana Erupsi Gunungapi
- Indikator 57: Rencana Kontijensi Kekeringan
- Indikator 58: Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
- Indikator 59: Rencana Kontijensi Banjir Bandang

<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 60: Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang • Indikator 61: Penentuan Status Tanggap Darurat • Indikator 62: Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat • Indikator 63: Pengerahan Tim Kaji Cepat Ke Lokasi Bencana • Indikator 64: Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban • Indikator 65: Perbaikan Darurat • Indikator 66: Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh • Indikator 67: Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana
<p>Prioritas 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 68: Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah • Indikator 69: Pemulihan Infrastruktur Penting • Indikator 70: Perbaikan Rumah Penduduk • Indikator 71: Pemulihan Penghidupan Masyarakat

4.3 Hasil Pengolahan Data

Setelah melaksanakan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dari hasil pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder. Untuk data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber terkait. Data sekunder dan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan telah dimasukkan ke dalam lampiran sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa keabsahan data untuk mengetahui akurasi hasil penelitian melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

4.3.1 Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo

Kegiatan pengolahan data pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berbasis Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Glagaharjo dilaksanakan menggunakan panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan yang diterbitkan oleh BNPB dan disusun oleh Pangarso Suryotomo dkk (2019). Panduan tersebut disusun berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357: 2017. Panduan ini telah digunakan menjadi acuan untuk menilai upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim di tingkat desa/kelurahan.

Panduan ini terdiri dari 5 komponen dan 28 indikator yang digunakan untuk menilai ketangguhan desa/kelurahan. Lima komponen dalam panduan penilaian ini yaitu 1) kualitas dan akses layanan dasar, 2) dasar sistem penanggulangan bencana, 3) pengelolaan risiko bencana, 4) kesiapsiagaan darurat, dan 5) kesiapsiagaan pemulihan.

Tabel 4.11 Pengolahan Data Pelaksanaan Program Destana

Komponen 1. Kualitas dan Akses Layanan Dasar	
<ul style="list-style-type: none"> Indikator 1: Tersedianya Fasilitas Pendidikan Formal maupun Non Formal dengan kualitas yang baik dan mudah dicapai oleh masyarakat <p>Desa Glagaharjo memiliki 6 PAUD, 3 TK dan 3 SD. TK dan SD tersebut telah melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Berikut ini rincian masing-masing fasilitas pendidikan tersebut:</p>	
PAUD	1) PAUD Arimbi, 2) PAUD Bunga Persada, 3) PAUD Sadewa, 4) PAUD Bina Anak Sarana Mandiri, 5) PAUD Uswatun Hasanah, 6) PAUD Aisyah Besalen
TK	1) TK ABA Cepitsari, 2) TK Bina Anak Sarana Mandiri, 3) TK

	Puspitasari
SD	1) SD N Glagaharjo, 2) SD Muhammadiyah Cepitsari, 3) SD N Srunen

Terkait pendidikan non formal, Desa Glagaharjo memiliki program pendidikan sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Glagaharjo
3. Penyelenggaraan program sanggar belajar desa
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
5. Pemberiaan bantuan insentif kepada tenaga pengajar di Desa

• **Indikator 2: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kualitas Yang Baik Dan Mudah Dicapai Oleh Masyarakat**

Desa Glagaharjo memiliki fasilitas layanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Polindes yang ada di setiap dusun. Desa Glagaharjo juga memiliki berbagai macam program bidang Kesehatan, yaitu:

1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan kepada Masyarakat
2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana posyandi dan polindes
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik
6. Pembinaan Tanaman Obat Keluarga

• **Indikator 3: Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Mudah Dijangkau Masyarakat**

Desa Glagaharjo memiliki beberapa program yang berkaitan dengan Sarana Prasarana Transportasi, yaitu

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan
2. Pemeliharaan sarana prasarana jalan kelurahan (gorong-gorong,

selokan, parit, drainase, dll)

3. Pembuatan dan pemeliharaan rambu-rambu di jalan kelurahan
4. Pengadaan fasilitas penerangan jalan kelurahan
5. Pembangunan tempat/lahan parkir

Namun di Desa Glagaharjo tidak ada fasilitas kendaraan umum bagi warga. Untuk kebutuhan transportasi, masyarakat hanya memanfaatkan kendaraan pribadi masing-masing atau tetangga.

- **Indikator 4: Tersedianya Pelayanan Publik Yang Baik**

Berkaitan dengan pelayanan publik, Desa Glagaharjo memiliki lapangan, gedung aula, barak pengungsian dan barak ternak. Pihak desa juga juga rutin melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana publik tersebut. Mengacu pada dokumen RPJM Desa Glagaharjo, berikut ini beberapa program yang menunjang ketersediaan pelayanan publik:

1. Pembangunan dan pemeliharaan gedung dan prasarana kelurahan
2. Pengelolaan dan pemeliharaan perpustakaan/taman bacaan kelurahan
3. Pengelolaan dan pemeliharaan sanggar belajar kesenian dan agama kelurahan
4. Pengelolaan dan pemeliharaan barak pengungsian dan gedung aula kelurahan
5. Pengelolaan dan pemeliharaan lapangan kelurahan
6. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana pariwisata milik kelurahan
7. Pengadaan dan pengelolaan pos kesehatan Covid-19
8. Pengadaan dan pengelolaan pos pemantauan Merapi.
9. Pembangunan dan pemeliharaan sarpras pasar kelurahan
10. Pengelolaan dan Pemeliharaan pemakaman milik desa
11. Pengelolaan dan Pemeliharaan situs bersejarah/petilasan milik desa

- **Indikator 5: Tersedianya Sistem Informasi Yang Dapat Menjangkau Seluruh Masyarakat Desa/Kelurahan Secara Cepat**

Berkaitan dengan sistem informasi, pemerintah desa memanfaatkan teknologi media sosial seperti grup Whatsapp dan Instagram dalam menyebarkan informasi. Desa juga memiliki situs *website* resmi yang dapat diakses di <https://glagaharjo.smartvillage.id/> namun belum digunakan secara optimal. Kedepan pihak desa akan mengembangkan situs webiste tersebut dan mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk menyebarkan informasi.

Untuk menunjang ketersediaan sistem informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa, pemerintah desa memiliki program sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan informasi publik kelurahan (poster, baliho, dll)
2. Pengelolaan *website* dan sosial media kelurahan (Whatsapp dan Instagram)
3. Pengembangan pelayanan kelurahan online
4. Pengembangan sistem informasi desa

- **Indikator 6: Adanya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Yang Mandiri Dan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas**

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah Desa Glagaharjo telah melaksanakan tata kelola sesuai dengan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Namun setelah dievaluasi tetap terdapat tumpang tindih jobdeks pada beberapa bidang. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa pengurus masih terbawa oleh budaya yang dahulu. Berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintah desa dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, Desa Glagaharjo memiliki program sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Pembinaan/bimtek pada sub bidang administrasi kependudukan,

pencatatan sipil, dan statistik pendataan.

3. Pengembangan SOP pelayanan publik kelurahan
4. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan Glagaharjo
5. Program peningkatan kapasitas lurah
6. Program peningkatan kapasitas perangkat kelurahan
7. Program peningkatan kapasitas BPK

• **Indikator 7: Adanya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan**

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, Desa Glagaharjo memiliki program sebagai berikut:

1. Program penataan lahan pertanian di tanah kas desa
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber mata air desa
3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi Tepat guna untuk perikanan darat
4. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian)
5. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan)
6. Pembinaan dan pelatihan Kelompok Tani

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang berkelanjutan. Terutama sumber mata air yang selalu dipantai dan dirawat karena menjadi kebutuhan utama masyarakat. Terkait aktivitas penambangan pasir yang dapat mengancam keberadaan mata air dan kelestarian lingkungan pihak desa tidak dapat melakukan intervensi, karena aktivitas tersebut menjadi tanggung jawab dinas SDM Kabupaten Sleman.

• **Indikator 8: Adanya Penguatan Perlindungan & Dukungan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Budaya Dan Spiritual Masyarakat**

Desa Glagaharjo memiliki berbagai macam kegiatan kebudayaan dan spiritual, seperti ketoprak, jathilan, campursari, wayang, upacara dandan kali, karawitan, hadroh, macapat dan mertu desa. Kegiatan spiritual seperti kendurian, sadranan, becekan, dan pengajian juga rutin dilaksanakan di Desa. Pemerintah Desa Glagaharjo telah menyiapkan anggaran untuk menunjang kegiatan kebudayaan dan spiritual tersebut, desa juga terus mendorong setiap dusun untuk terus melaksanakan kegiatan keseniannya. Berkaitan dengan penguatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat, Desa Glagaharjo memiliki program sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata tingkat desa (peningkatan sarana prasarana)
2. Pengembangan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
3. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan, kabupaten/kota
4. Penyelenggaraan festival kesenian, adat, dan keagamaan di tingkat desa
5. Pelaksanaan upacara adat/peringatan hari jadi desa
6. Pembinaan dan pelatihan bagi pengurus tempat ibadah
7. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan
8. Pelaksanaan pameran/gelar potensi desa
9. Pendampingan, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya lokal.

• **Indikator 9: Adanya Perlindungan Keamanan Masyarakat**

Desa Glagaharjo memiliki Linmas (Pelindung Masyarakat) yang menjaga keamanan masyarakat dan Komunitas Siaga Merapi (KSM) yang berisi relawan kebencanaan. Linmas dan KSM turut berkoordinasi dengan Babinsa dalam menjalankan kegiatan perlindungan keamanan masyarakat. Desa juga terus mengajukan dana kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan

sarana prasarana KSM untuk memantau kondisi Gunung Merapi. Berkaitan dengan perlindungan keamanan masyarakat, Desa Glagaharjo memiliki program sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan Pemerintah Desa
3. Pelatihan kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana skala lokal desa
4. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa
5. Penambahan insentif tenaga keamanan pemerintah desa.

Komponen 2. Dasar Sistem Penanggulangan Bencana

- **Indikator 10: Adanya Kebijakan Pendukung Dalam Upaya Pengelolaan Risiko Bencana Di Desa/Kelurahan**

Desa sudah menyusun dokumen rencana kontingensi untuk pengurangan risiko bencana erupsi Gunung Merapi. Dokumen ini berisi rencana dan strategi dalam mengevakuasi warga masyarakat ketika terjadi kondisi gawat darurat bencana erupsi Merapi. Dengan dokumen ini, masyarakat turut teredukasi untuk memahami Risiko bencana dan dapat mengantisipasi ancaman secara mandiri sejak dini. Terdapat beberapa kebijakan yang mendukung upaya pengelolaan risiko bencana di Desa Glagaharjo, yaitu:

1. Peraturan Desa tentang penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Desa Glagaharjo
2. Peraturan Desa tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glagaharjo tahun 2020
3. Peraturan Desa tentang Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana
4. SK Tim Manajemen dan Posko Bencana
5. SK Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

- **Indikator 11: Tersedianya Regulasi Desa/Kelurahan Untuk**

Pengelolaan Risiko Bencana Dalam Suatu Kawasan

Desa Glagaharjo telah memiliki regulasi untuk pengelolaan risiko bencana dengan menyusun dokumen rencana kontingen erupsi Gunung Merapi yang berisi upaya dan inisiatif dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di kawasan Desa Glagaharjo. Secara spesifik dokumen ini memberikan landasan operasional, strategi, dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Pihak Desa Glagaharjo juga telah melaksanakan kerjasama dengan desa tetangga berupa program *Sister Village* dengan Desa Argomulyo dan Desa Sindumartani. Anggaran kegiatan *Sister Village* ini berasal dari BPBD Sleman.

- **Indikator 12: Terlaksananya Pengkajian Risiko Bencana Dan Potensi Dampak Perubahan Iklim Desa/Kelurahan Secara Berkala Dan Berkelanjutan**

Merujuk pada dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Desa Glagaharjo, desa telah melakukan pengkajian risiko bencana dan potensi dampak dari ancaman erupsi merapi. Pengkajian yang dilakukan oleh Desa Glagaharjo bertujuan untuk melakukan penilaian ancaman, penilaian kerentanan dan pengkajian kapasitas. Risiko tertinggi erupsi Gunung Merapi berada di KRB 3 dan kawasan yang berada di tepi-tepi sungai. Hasil kajian pada dokumen rencana kontingensi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa terkait pengembangan wilayah, pembuatan alur evakuasi, sarana prasarana kebencanaan dan fasilitas umum kebencanaan.

- **Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan Yang Menjadi Bagian Perencanaan Pembangunan Pada Pemerintahan Vertikal**

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Glagaharjo, Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi telah menjadi bagian dalam rencana pembangunan Desa Glagaharjo. Berdasarkan dokumen RPJM, Desa Glagaharjo telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 untuk menunjang rencana kontingensi tersebut.

- **Indikator 14: Adanya Dukungan Lembaga Luar Untuk Pengelolaan Risiko Bencana Sesuai Dengan Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan Atau Rencana Strategis Kelurahan**

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko bencana, terdapat dukungan dari lembaga luar desa, yaitu BPBD Kabupaten Sleman, BPPTKG Kabupaten Sleman, Red-R, PMI dan juga FKKRS (Forum Komunikasi Kelompok Relawan Sleman). Dari pihak universitas masih jarang. Dukungan dari lembaga luar tersebut turut meningkatkan jumlah anggaran dana PRB desa.

- **Indikator 15: Adanya Penyelarasan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Antar Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan**

Terdapat perjanjian kerjasama untuk melaksanakan penyelarasan rencana PB, namun hanya dengan desa yang memiliki perjanjian *Sister Village* saja (Desa Argomulyo dan Desa Sindumartani). Selain desa tersebut, Desa Glagaharjo tidak melakukan penyelarasan apapun.

- **Indikator 16. Optimalitas Peran Serta Forum Pengelolaan Risiko Bencana Desa Atau Kelurahan Dalam Mewujudkan Rencana Pembangunan Desa Atau Rencana Strategis Kecamatan Untuk Kelurahan**

Desa Glagaharjo telah memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang telah memiliki SK secara legal dan dikoordinatori oleh Komunitas Siaga Merapi (KSM) didampingi oleh Unit Pelaksana (Unitlak) Kebencanaan dan Keamanan Desa Glagaharjo. Mengacu pada dokumen

RPJM Desa Glagaharjo, desa mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 untuk kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Komponen 3. Pengelolaan risiko bencana

- **Indikator 17. Adanya Aksi Terpadu Pengelolaan Risiko Bencana Antara Desa/Kelurahan Dalam Suatu Kawasan**

Pihak Desa Glagaharjo telah menyusun Penilaian risiko bencana erupsi Gunung Merapi, dengan menilai kerentanan, menilai ancaman, dan menilai kapasitas, sehingga desa dapat mengetahui penyebab utama kerugian dari ancaman erupsi Gunung Merapi. Mengacu pada dokumen RPJM Desa Glagaharjo, berikut ini beberapa aksi yang telah dicanangkan oleh desa yang bertujuan untuk pengelolaan risiko bencana, yaitu:

1. Penilaian risiko bencana erupsi Gunung Merapi
2. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa
3. Melaksanakan gladi lapangan terkait pengelolaan bencana secara rutin
4. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa
5. Pengalokasian dana untuk kegiatan penanggulangan bencana

Ketika terjadi bencana, pihak desa turut bekerjasama dengan desa tetangga dalam melaksanakan evakuasi. Relawan antar desa sudah memiliki hubungan yang baik.

- **Indikator 18. Peningkatan Wawasan Dan Keterampilan Untuk Mengelola Risiko Bencana Melalui Edukasi, Sosialisasi Dan Literasi Kebencanaan**

Masyarakat Desa Glagaharjo, terutama yang menjadi relawan Kelompok Siaga Merapi (KSM) sering mendapatkan pelatihan dari pihak BPBD Sleman terkait pelatihan kebencanaan dan PMI Sleman terkait pertolongan pertama korban bencana. Pihak Desa Glagaharjo sendiri mengadakan program pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana pada skala lokal desa yang rutin

dilakukan oleh masyarakat terutama aparaturnya desa.

Komponen 4. Kesiapsiagaan darurat

- **Indikator 19. Tersedianya Mekanisme Untuk Mendeteksi Dini Kemungkinan Terjadinya Bencana Pada Skala Desa/Kelurahan**

Dalam mendeteksi dini kemungkinan terjadinya bencana, Desa Glagaharjo telah memiliki pihak yang bertugas untuk memantau aktivitas Gunung Merapi, yaitu Komunitas Siaga Merapi (KSM) yang telah legal dibentuk oleh Pemerintah Desa dan diberi anggaran dana untuk melaksanakan tugasnya. KSM juga diberi fasilitas berupa beberapa pos pengamatan, 2 mobil ambulan, peralatan komunikasi, tower *EWS*, peralatan kesehatan dan peralatan evakuasi bencana.

- **Indikator 20. Tersedianya Mekanisme Penerima Peringatan Dini Dan/Atau Perintah Evakuasi**

Desa Glagaharjo yang sebagian daerahnya berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III telah dilengkapi dengan menara *early warning system* yang dikelola langsung oleh pihak BPPTKG Yogyakarta. Mekanisme penyebaran informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak desa dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu dengan menyebarkan informasi terkait arahan evakuasi melalui sosial media grup whatsapp, siaran radio frekuensi HT, sirine manual oleh warga dan melakukan *gethok tular* antar warga (dari mulut ke mulut). Desa juga telah menyusun SOP sistem peringatan dini yang telah tercantum di dokumen kontingensi erupsi Gunung Merapi.

- **Indikator 21. Berfungsinya Mekanisme Penyebaran Arahan Evakuasi Yang Mudah Diakses Dan Dipahami Semua Pihak Termasuk Kelompok Rentan**

Mengacu pada dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi, Desa Glagaharjo telah memiliki rencana dan strategi penyelamatan, yang meliputi

penyelamatan warga, penyelamatan harta/surat penting dan penyelamatan hewan ternak. Rencana tersebut kemudian direalisasikan menjadi SOP penyelamatan yang ditulis di dokumen rencana kontingensi. Berkaitan dengan penyebaran informasi, terdapat mekanisme penyebaran informasi berupa arahan untuk mengungsi sebelum bencana terjadi dari pemerintah desa. Arahan yang diberikan sesuai dengan fase dari bencana yang dijelaskan oleh BPPTKG. Semisal ketika fase siaga, sesuai rencana kontingensi masyarakat harus mengevakuasi diri ditempat evakuasi seperti di barak desa. Sebenarnya masyarakat sudah memahami aktivitas erupsi merapi, namun ada beberapa masyarakat yang menunggu instruksi dulu. Contohnya jika kepala dusun tidak memberikan arahan untuk evakuasi maka warga enggan mengevakuasi diri.

- **Indikator 22. Tersedianya Peta Rencana Evakuasi Masyarakat Yang Dapat Digunakan Sebelum Dan Pada Saat Bencana Terjadi**

Desa Glagaharjo sudah memiliki peta rencana evakuasi secara fisik, namun hanya terdapat di dokumen rencana kontingensi saja dan belum dipajang di kelurahan atau di *website* kelurahan, sehingga tidak dapat diakses oleh warga umum.

- **Indikator 23. Tempat Evakuasi**

Desa Glagaharjo telah memiliki tempat evakuasi sementara yang cukup memadai untuk masyarakat yang berisiko, yaitu barak Desa Glagaharjo. Selain itu, Desa Glagaharjo juga telah bekerja sama dengan desa tetangga yang tidak berada di daerah rawan bencana untuk menjadi tempat evakuasi bagi warga Desa Glagaharjo yang mengungsi yang dibantu oleh relawan yang selalu ada, baik relawan dari desa maupun dari luar desa. Mengacu pada dokumen rencana kontingensi, berikut ini beberapa tempat evakuasi yang dimiliki oleh Desa Glagaharjo dan hasil kerjasama dengan desa tetangga:

Warga Dusun	Tempat Evakuasi
Warga Dusun Kalitengah Lor (549 Jiwa)	Barak Gayam (Kapasitas 400 Jiwa) di Desa Argomulyo
Warga Dusun Kalitengah Kidul (336 Jiwa)	Balai Desa Glagaharjo (Kapasitas 600 Jiwa)
Warga Dusun Srunen (453 Jiwa)	Barak Desa Glagaharjo (Kapasitas 450 Jiwa)
Warga Dusun Singlar (388 Jiwa)	Musholla Desa (Kapasitas 365 Jiwa)
Warga Dusun Jetis Sumur (241 Jiwa)	Barak Koripan (Kapasitas 300 Jiwa) di Desa Sindumartani
Warga Dusun Gading (278 Jiwa)	
Warga Dusun Glagah Malang (271 Jiwa)	

- **Indikator 24. Jalur Dan Rambu Evakuasi**

Desa Glagaharjo memiliki 2 jalur evakuasi, 1 jalur di jalan poros desa dan 1 jalur di jalan perbatasan dengan Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Di sepanjang jalan dan kawasan desa telah tersedia rambu evakuasi dan rambu titik kumpul yang penyediaannya dibantu oleh BPBD Sleman dan pemkab Sleman. Desa Glagaharjo hanya berkewajiban untuk merawat dan menjaga rambu-rambu tersebut.

- **Indikator 25. Adanya Latihan Kesiapsiagaan Bencana Secara Berkala Dan Berkelanjutan Tingkat Desa/Kelurahan**

BPBD Kabupaten Sleman pernah memberikan pelatihan kebencanaan dan PMI Sleman juga pernah memberikan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, namun belum dilaksanakan secara rutin. Tahun 2020 desa berinisiatif mengadakan pelatihan rutin kesiapsiagaan/tanggap bencana pada tingkat skala lokal yang sudah mendapat anggaran sebesar Rp.

150.000.000,00. Pelatihan tersebut ditujukan kepada masyarakat Desa Glagaharjo terutama yang menjadi relawan di komunitas kebencanaan.

- **Indikator 26. Tersedianya Relawan Penanggulangan Bencana Desa Atau Kelurahan Yang Memiliki Kemampuan Dalam Melakukan Penanganan Darurat Bencana**

Desa Glagaharjo telah memiliki relawan yang bergerak di pengelolaan bencana, yaitu Komunitas Siaga Merapi (KSM) yang telah dilegalkan oleh pemerintah desa. Relawan KSM telah mendapatkan pelatihan kebencanaan dari pihak BPBD Sleman dan PMI Sleman. Relawan KSM juga dibekali dengan sarana prasarana berupa mobil ambulance, alat komunikasi, pos pemantau Gunung Merapi, gergaji mesin, alat P3K dan alat evakuasi lainnya.

Komponen 5. Kesiapsiagaan pemulihan

- **Indikator 27. Tersedianya Berbagai Mekanisme Yang Ditujukan Untuk Upaya Pemulihan Dini Bencana Di Tingkat Desa/Kelurahan**

Berkaitan dengan mekanisme upaya pemulihan dini bencana di tingkat desa, Desa Glagaharjo belum mampu melakukan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana. Untuk melakukan penilaian tersebut perlu dibantu oleh BPBD Sleman dan ahli/peneliti. Desa hanya mampu mengelola bantuan yang masuk ke desa secara mandiri melalui unitlak kebencanaan dibawah pengelolaan pemerintah desa.

- **Indikator 28. Tersedianya Perencanaan Pemulihan Berkelanjutan Untuk Berbagai Aset Dan Properti Strategis Yang Berisiko Tinggi Rusak Terkena Bencana**

Berkaitan dengan perencanaan pemulihan berkelanjutan, mengadu pada dokumen rencana kontingensi Desa Glagaharjo telah mampu penilaian risiko bencana. Desa telah melakukan penilaian terkait penilaian ancaman, penilaian kerentanan dan pengkajian kapasitas masyarakat. Kegiatan

penilaian tersebut dilakukan oleh unitlak kebencanaan desa dibantu KSM. Kawasan yang memiliki kerentanan tinggi berada di kawasan rawan bencana (KRB) III yaitu dusun Srunen, Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul. Terdapat pula kawasan pariwisata, yaitu Bukit Klangon dan Teras Merapi. Selain itu, terdapat beberapa warga yang rumahnya berada di sekitaran Sungai Gendol dari beberapa dusun yang rumahnya di relokasi ke tempat yang lebih aman. Yaitu warga dari Dusun Singlar, Glagah Malang, Ngancar dan Besalen. Warga yang berada di sekitar Sungai Gendol tersebut direlokasi ke huntap yang dibangun oleh pemerintah. Terdapat 3 hunian tetap (huntap) yang dibangun oleh pemerintah bagi warga yang rumahnya di relokasi, yaitu Huntap Banjarsari, Huntap Gading dan Huntap Jetis Sumur.

4.3.2 Implikasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan dilakukan kategorisasi menurut variabel komponen dan indikator pengurangan risiko bencana berbasis Destana di Desa Glagaharjo, terdapat total 33 dari 71 indikator ketahanan wilayah Kabupaten Sleman yang didukung oleh komponen dan indikator program destana Desa Glagaharjo, yaitu tepatnya pada prioritas 1, 2, 3, 4, 6 dan 7. Berikut ini hasil pengolahan data pengurangan risiko bencana berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo yang berimplikasi terhadap ketahanan wilayah, dinilai berdasarkan Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diterbitkan oleh BNPB tahun 2015.

Tabel 4.12 Korelasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo Berdasar Indikator dalam IKD

Indikator Ketahanan Wilayah	Korelasi	
	Ya	Tidak
Prioritas 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		
• Indikator 1: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	✓	
• Indikator 2: Pembentukan BPBD	✓	
• Indikator 3: Tentang Pembentukan Forum PRB	✓	
• Indikator 4: Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	✓	
• Indikator 5: Kebijakan Daerah tentang PRB	✓	
• Indikator 6: Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB		✓
• Indikator 7: Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓	
• Indikator 8: Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana	✓	
• Indikator 9: Komitmen DPRD terhadap PRB	✓	
Prioritas 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu		
• Indikator 10: Peta Bahaya dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah	✓	
• Indikator 11: Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah		✓
• Indikator 12: Peta Kapasitas dan Kajiannya	✓	
• Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana	✓	
Prioritas 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik		
• Indikator 14: Sarana Penyampaian Informasi	✓	

<p>Kebencanaan Yang Menjangkau Langsung Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 15: Sosialisasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Pada Tiap-Tiap Kecamatan Di Wilayahnya • Indikator 16: Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Minimal Beranggotakan Lembaga-Lembaga Dari Sektor Pemerintah, Masyarakat Maupun Dunia Usaha • Indikator 17: Pusdalops PB Dengan Fasilitas Minimal Mampu Memberikan Respon Efektif untuk Pelaksanaan Peringatan Dini Dan Penanganan Masa Krisis • Indikator 18: Sistem Pendataan Bencana Yang Terhubung Dengan Sistem Pendataan Bencana Nasional • Indikator 19: Pelatihan Dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB • Indikator 20: Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan • Indikator 21: Kajian Kebutuhan Peralatan Dan Logistik Kebencanaan • Indikator 22: Pengadaan Kebutuhan Peralatan Dan Logistik Kebencanaan • Indikator 23: Penyimpanan/Pergudangan Logistik PB • Indikator 24: Pemeliharaan Peralatan Dan Supply Chain Logistik Yang Diselenggarakan Secara 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>✓</p> <p></p> <p>✓</p> <p>✓</p>
--	---	--

Periodik <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 25: Tersedianya Energi Listrik untuk Kebutuhan Darurat • Indikator 26: Kemampuan Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kebutuhan Darurat 		✓ ✓
Prioritas 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana		
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 27: Penataan Ruang Berbasis PRB • Indikator 28: Informasi Penataan Ruang Yang Mudah Diakses Publik • Indikator 29: Sekolah Dan Madrasah Aman Bencana • Indikator 30: Rumah Sakit Aman Bencana Dan Puskesmas Aman Bencana • Indikator 31: Desa Tangguh Bencana 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Prioritas 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 32: Penerapan Resapan Air untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Banjir • Indikator 33: Perlindungan Daerah Tangkapan Air • Indikator 34: Restorasi Sungai • Indikator 35: Penguatan Lereng • Indikator 36: Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan • Indikator 37: Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan 		✓ ✓ ✓ ✓ ✓

<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 38: Pemantauan Berkala Hulu Sungai • Indikator 39: Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi • Indikator 40: Tanaman Dan/Atau Bangunan Penahan Gelombang Tsunami • Indikator 41: Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk Dan Taman Kota • Indikator 42: Restorasi Lahan Gambut • Indikator 43: Konservasi Vegetatif DAS Rawan Longsor 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
<p>Prioritas 6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Pengangan Darurat Bencana</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 44: Rencana Kontijensi Gempabumi • Indikator 45: Rencana Kontijensi Tsunami • Indikator 46: Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami • Indikator 47: Rencana Evakuasi Bencana Tsunami • Indikator 48: Rencana Kontijensi Banjir • Indikator 49: Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir • Indikator 50: Rencana Kontijensi Tanah Longsor • Indikator 51: Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor • Indikator 52: Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan • Indikator 53: Sistem Peringatan Dini Bencana 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

<p>Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 54: Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi • Indikator 55: Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi • Indikator 56: Infrastruktur Evakuasi Bencana Erupsi Gunungapi • Indikator 57: Rencana Kontijensi Kekeringan • Indikator 58: Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan • Indikator 59: Rencana Kontijensi Banjir Bandang • Indikator 60: Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang • Indikator 61: Penentuan Status Tanggap Darurat • Indikator 62: Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat • Indikator 63: Pengerahan Tim Kaji Cepat Ke Lokasi Bencana • Indikator 64: Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban • Indikator 65: Perbaikan Darurat • Indikator 66: Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh • Indikator 67: Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p></p> <p></p> <p>✓</p> <p></p> <p></p> <p>✓</p>
<p>Prioritas 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana</p>		

• Indikator 68: Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah	✓	
• Indikator 69: Pemulihan Infrastruktur Penting		✓
• Indikator 70: Perbaikan Rumah Penduduk	✓	
• Indikator 71: Pemulihan Penghidupan Masyarakat		✓

Tabel 4.13 Hasil Pengolahan Data Implikasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Destana

Komponen Destana Desa Glagaharjo	Implikasi terhadap Ketahanan Wilayah	Indikator yang Mendukung	Total Indikator Pendukung	Kesimpulan
Kualitas dan akses layanan dasar	Sesuai dengan Prioritas 4: Penanganan tematik kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 27: Adanya penataan ruang berbasis PRB • Indikator 28: Informasi penataan ruang mudah diakses publik • Indikator 29: Adanya Sekolah Aman Bencana • Indikator 30: Adanya Puskesmas Aman Bencana • Indikator 31: Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana 	5/5	Berdasarkan hasil akumulasi data menunjukkan bahwa seluruh komponen desa tangguh bencana berimplikasi terhadap
Dasar sistem penanggulangan bencana	Sesuai dengan Prioritas 1: Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1: Adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di desa oleh BPBD • Indikator 2: Adanya BPBD • Indikator 3: Adanya pembentukan forum PRB • Indikator 4: Adanya 	8/9	ketahanan wilayah dengan memenuhi 6 dari 7 prioritas yang telah ditetapkan BNPB

Komponen Destana Desa Glagaharjo	Implikasi terhadap Ketahanan Wilayah	Indikator yang Mendukung	Total Indikator Pendukung	Kesimpulan
		<p>peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 5: Adanya kebijakan tentang PRB • Indikator 7: Lembaga BPBD telah berfungsi secara efektif • Indikator 8: FPRB sudah legal dan menjalankan fungsinya secara efektif • Indikator 9: Adanya dukungan BPBD terhadap PRB 		<p>untuk menilai ketahanan wilayah, dengan rincian 33 indikator dari total 71 indikator penilaian IKD telah sesuai dengan program</p>
<p>Pengelolaan risiko bencana</p>	<p>Sesuai dengan Prioritas 3: Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 14: Adanya sistem penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat • Indikator 15: Adanya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana • Indikator 16: Adanya komunikasi bencana lintas lembaga • Indikator 17: Adanya Pusat Pengendali 	<p>8/13</p>	<p>pengurangan risiko bencana berbasis Destana di Desa Glagaharjo.</p>

Komponen Destana Desa Glagaharjo	Implikasi terhadap Ketahanan Wilayah	Indikator yang Mendukung	Total Indikator Pendukung	Kesimpulan
		<p>Operasi PB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 18: Adanya sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional • Indikator 19: Adanya pelatihan penggunaan peralatan PB • Indikator 21: Adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan • Indikator 22: Adanya pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 		
Kesiapsiagaan darurat	Sesuai dengan Prioritas 2: Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, dan;	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 10: Adanya peta bahaya dan kajiannya untuk bencana Gunungapi • Indikator 12: Adanya peta kapasitas dan kajiannya • Indikator 13: Adanya Rencana 	3/4	

Komponen Destana Desa Glagaharjo	Implikasi terhadap Ketahanan Wilayah	Indikator yang Mendukung	Total Indikator Pendukung	Kesimpulan
	<p>Sesuai dengan Prioritas 6: Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana</p>	<p>Penanggulangan Bencana (RPB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 54: Adanya rencana kontijensi erupsi gunungapi • Indikator 55: Adanya sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi • Indikator 56: Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi • Indikator 62: Adanya penerapan sistem komando tanggap darurat bencana • Indikator 63: Adanya tim kaji cepat (relawan) ke lokasi bencana • Indikator 64: Adanya pengerahan tim penyelamatan korban • Indikator 66: Adanya pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh 	7/14	

Komponen Destana Desa Glagaharjo	Implikasi terhadap Ketahanan Wilayah	Indikator yang Mendukung	Total Indikator Pendukung	Kesimpulan
Kesiapsiagaan pemulihan	Sesuai dengan Prioritas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator 68: Adanya pemulihan pelayanan dasar pasca bencana • Indikator 70: Adanya perbaikan rumah penduduk 	2/4	

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo

Analisis data pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo menggunakan panduan pada dokumen penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan yang disusun oleh Pangarso Suryotomo dkk (2019). Terdapat 5 komponen dan 28 indikator pada penilaian tersebut. Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada formulir penilaian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi setiap indikator. Setiap indikator berisikan 4 pertanyaan, nilai setiap indikator diperoleh berdasarkan jumlah pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban “Ya”. Jika keempat pertanyaan pada indikator dapat dijawab dengan jawaban “Ya” maka mendapatkan nilai maksimal sebesar 4 pada indikator tersebut. 4 pertanyaan tersebut menunjukkan tingkatan yang menunjukkan kecenderungan masing-masing. Pertanyaan pertama menunjukkan keberadaan dasar, pertanyaan kedua tentang keberfungsian, pertanyaan ketiga tentang proses evaluasi dan refleksi, dan pertanyaan keempat tentang diseminasi dan advokasi (Suryotomo, 2019: 9). Berikut ini analisis pada setiap indikator penilaian desa tangguh bencana:

Tabel 4.14 Analisis Data Indikator Desa Tangguh Bencana

Indikator	Analisis	Nilai
Komponen 1. Kualitas dan Akses Layanan Dasar		
Indikator 1	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 2	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 3	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 4	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya,	3

Indikator	Analisis	Nilai
	pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	
Indikator 5	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 6	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 7	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 8	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 9	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Jumlah Nilai		31
Komponen 2 Dasar Sistem Penanggulangan Bencana		
Indikator 10	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 11	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 12	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 13	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 14	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 15	2 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 3 dan 4 tidak dapat dipenuhi	2
Indikator 16	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Jumlah Nilai		23
Komponen 3 Pengelolaan Risiko Bencana		
Indikator 17	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 18	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Jumlah Nilai		8
Komponen 4 Kesiapsiagaan Darurat		
Indikator 19	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 20	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4

Indikator	Analisis	Nilai
Indikator 21	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 22	2 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 2 dan 4 tidak dapat dipenuhi	2
Indikator 23	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 24	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Indikator 25	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 4 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 26	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Jumlah Nilai		29
Komponen 5 Kesiapsiagaan Pemulihan		
Indikator 27	3 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya, pertanyaan nomor 1 tidak dapat dipenuhi	3
Indikator 28	4 pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban ya	4
Jumlah Nilai		7
Jumlah Nilai Total		98

4.4.2 Implikasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Ketahanan wilayah adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar untuk menjamin identitas, integritas dan tujuan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, ketahanan wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan suatu wilayah (Pradika, Giyarsih dan Hartono, 2018, p. 264).

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan konsep desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi

ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No 1 Tahun 2012). Pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana dapat mendukung terwujudnya ketahanan wilayah, karena program Destana dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PRB berbasis Destana yang dilakukan oleh Desa Glagaharjo berimplikasi positif dalam mengurangi risiko bencana dan mewujudkan ketahanan wilayah Kabupaten Sleman, karena program Destana yang tersusun atas 5 komponen utama telah memenuhi 6 dari 7 prioritas yang telah disepakati dalam mewujudkan ketahanan wilayah.

Pertama, prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Prioritas ini sesuai dengan komponen “Dasar sistem penanggulangan bencana” dalam panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis Destana pada prioritas ini telah dibuktikan dengan memenuhi 8 dari 9 indikator. Penetapan kebijakan di Desa Glagaharjo mengikuti kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah, yaitu mengacu pada pembentukan dan keterlibatan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya bencana gunungapi. BPBD sebagai lembaga khusus yang menangani PB di daerah sering mengadakan kerjasama dengan pihak komunitas baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun 2021 lalu, BPBD membuat rencana kontingensi untuk perencanaan erupsi Merapi yang bekerjasama dengan UNICEF. Selain itu, ada pula kerjasama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah dan pihak akademisi yang dilakukan secara kontinyu, seperti dengan LSM, *Emergency Service*, KIPA, LINGKAR, UGM, dan UPN. Prioritas kelembagaan juga didukung dengan adanya pembentukan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) tingkat desa pada tahun 2010, yang dikoordinatori oleh Komunitas Siaga Merapi (KSM) dan Unit

Pelaksanaan Kebencanaan (Unitlak) Desa Glagaharjo, Sebelum terjadinya erupsi Merapi tahun 2010, FPRB telah dibentuk namun dengan nama lain yaitu tim evakuasi dan sudah berjalan selama 1 tahun. Kini, lembaga PRB Desa Glagaharjo telah memiliki 80 anggota dengan struktur organisasi, program kerja, pembagian tugas dan SOP yang jelas pada masing-masing bidang.

Kedua, prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Prioritas ini sesuai dengan komponen “Kesiapsiagaan darurat” dalam panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis Destana pada prioritas ini telah dibuktikan dengan memenuhi 3 dari 4 indikator. Desa Glagaharjo memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik ancaman bencana yang ada di desa dalam bentuk peta kawasan rawan bencana seperti yang tercantum pada Gambar 4.2. Peta tersebut telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya khususnya untuk bencana Gunungapi Merapi, karena ancaman erupsi Gunung Merapi menjadi salah satu ancaman nyata terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis Destana juga terlaksana dengan adanya proses penyusunan dan pemanfaatan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) di desa. Desa Glagaharjo memiliki dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun untuk menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRJMDes). Dengan begitu, anggaran kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana Desa Glagaharjo dapat ditingkatkan dalam rangka menjadi bagian perencanaan pembangunan pada pemerintahan vertikal.

Ketiga, prioritas pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik. Prioritas ini sesuai dengan komponen “Pengelolaan risiko bencana” dalam panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis

Destana pada prioritas ini telah dibuktikan dengan memenuhi 8 dari 13 indikator. Desa Glagaharjo telah memiliki sistem penyampaian informasi kebencanaan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan cepat. Untuk memenuhi adanya ketersediaan sistem penyebaran data dan informasi kebencanaan, pemerintah desa memiliki program penyelenggaraan informasi publik kelurahan (poster, baliho, dll), pengelolaan *website* dan sosial media kelurahan (Whatsapp dan Instagram), pengembangan pelayanan kelurahan *online*, dan pengembangan sistem informasi desa. Seluruh data dari program-program tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi informasi (infografis, dokumen, laporan) dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa/kelurahan, dilanjutkan ke pemerintah kabupaten dan daerah. Program Destana di Desa Glagaharjo juga rutin mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada skala lokal desa yang dilakukan oleh masyarakat terutama aparatur desa untuk meningkatkan wawasan, keterampilan dan mengelola risiko bencana.

Keempat, prioritas penanganan tematik kawasan rawan bencana. Prioritas ini sesuai dengan komponen “Kualitas dan akses layanan dasar” dalam panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis Destana pada prioritas ini telah dibuktikan dengan memenuhi seluruh 5 indikator. Indikator-indikator tersebut yaitu adanya penataan ruang berbasis PRB, tersedianya informasi penataan ruang yang mudah diakses publik, adanya Sekolah Aman Bencana seperti yang tercantum dalam komponen kualitas dan akses layanan dasar dalam panduan penilaian program Destana, adanya Puskesmas Aman Bencana, serta realisasi Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo itu sendiri. Berkaitan dengan penataan ruang berbasis PRB, Desa Glagaharjo memiliki program penataan lahan pertanian di tanah kas desa, pengelolaan dan pemeliharaan sumber mata air desa, serta pembinaan dan pelatihan Kelompok Tani. Seluruh program

tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mewujudkan pengurangan risiko bencana. Adapun pelaksanaan kegiatan/program sekolah aman bencana yang fokus pada salah satu dari 3 (tiga) pilar pada SMAB (Sekolah dan Madrasah Aman Bencana) di Desa Glagaharjo telah berlangsung dengan adanya program Sekolah Siaga Bencana (SSB) pada tingkat TK dan SD. Tiga pilar yang dimaksud yaitu; (1) pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, (2) manajemen bencana sekolah, dan (3) sarana prasarana. Akses masyarakat desa ke Sekolah Siaga Bencana di Desa Glagaharjo juga tergolong mudah. Selain itu, sekolah juga telah dilengkapi oleh fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung 3 pilar tersebut.

Kelima, prioritas peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Desa Glagaharjo telah melakukan berbagai macam usaha mitigasi yang bertujuan untuk mendukung program Destana dan mengurangi risiko bencana di tingkat desa maupun wilayah. Namun, berdasar indikator yang terangkum di Juknis IKD, prioritas ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena risiko ancaman bencana pada prioritas 5 tidak sesuai dengan ancaman bencana yang terdapat di Desa Glagaharjo, Prioritas ini berfokus pada mitigasi bencana banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan serta kekeringan lahan pertanian. Sedangkan program Destana Desa Glagaharjo berfokus ke ancaman erupsi gunungapi yaitu Gunung Merapi. Hal ini dikarenakan letak geografis dan klimatologis Desa Glagaharjo memang berada di bagian lereng Merapi dengan jarak 4-5 km dari puncak, serta mengetahui fakta bahwa Desa Glagaharjo menjadi desa yang paling terdampak erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu.

Keenam, prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Prioritas ini sesuai dengan komponen “Kesiapsiagaan darurat” dalam panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis

Destana pada prioritas ini telah dibuktikan dengan memenuhi 7 dari 14 indikator. Dalam rangka mempersiapkan kesiapsiagaan darurat untuk pengurangan risiko bencana di Desa Glagaharjo, warga desa sudah memiliki inisiatif penyusunan rencana kontingensi (RenKon) untuk bencana erupsi gunungapi di daerah desa, khususnya yang berada di KRB 3 dan tepi-tepi sungai karena risiko tertinggi erupsi Gunung Merapi berada di kawasan tersebut. RenKon telah disusun sejak tahun 2015 dan sempat terhambat peresmiannya karena adanya pandemi *Covid-19*. Kendati demikian, RenKon tersebut telah diresmikan pada tahun 2020 dengan penyusunan yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Erupsi Gunungapi. Untuk erupsi Gunung Merapi, Desa Glagaharjo juga mempunyai sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunungapi. EWS tersebut terletak di tempat-tempat strategis untuk mengetahui ancaman bencana erupsi Gunung Merapi maupun banjir lahar hujan dan telah dilengkapi perangkat CCTV yang tersambung ke Pusat Pengendalian dan Operasi.

Perwujudan Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo untuk mengurangi risiko bencana terkait prioritas perkuatan dan kesiapsiagaan darurat juga dilengkapi dengan adanya infrastruktur evakuasi untuk bencana erupsi gunungapi. Desa Glagaharjo sudah memiliki tempat evakuasi sementara yang memadai bagi masyarakat berisiko, yaitu barak Desa Glagaharjo. Selain itu, Desa Glagaharjo juga telah bekerjasama dengan desa tetangga dengan adanya program *Sister Village*. Program ini melibatkan desa yang tidak berada di daerah rawan bencana untuk menjadi tempat evakuasi bagi warga Desa Glagaharjo, yaitu barak Gayam di Desa Argomulyo dan barak Koripan di Desa Sindumartani. Di sisi lain, desa juga memiliki tim kaji cepat penanggulangan bencana desa/kelurahan yang selalu siap sedia untuk melakukan penanganan

darurat bencana, baik relawan yang bersumber dari dalam maupun dari luar desa.

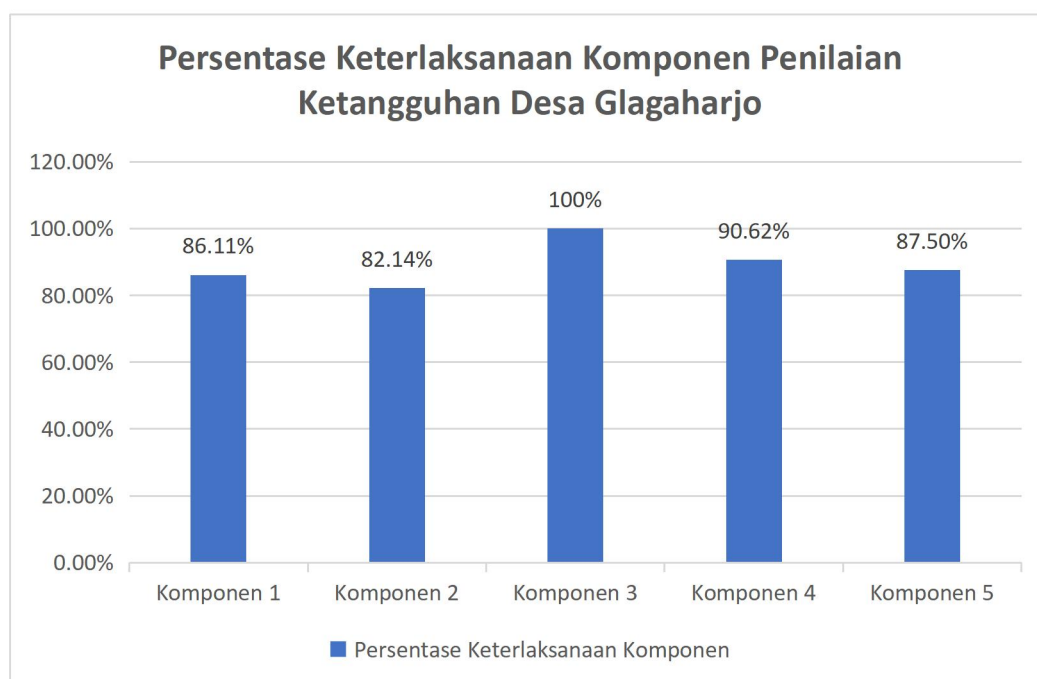
Ketujuh, prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana. Prioritas ini sesuai dengan komponen “Kesiapsiagaan pemulihan” dalam panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Upaya Desa Glagaharjo dalam mewujudkan ketahanan wilayah berbasis Destana pada prioritas ini telah dibuktikan dengan memenuhi 2 dari 4 indikator, yakni adanya pemulihan pelayanan dasar pasca bencana dan adanya perbaikan rumah penduduk. Untuk pemulihan pelayanan dasar pasca bencana, desa telah mampu melakukan secara mandiri yang dilaksanakan oleh Unitlak Kebencanaan dibantu oleh KSM. Untuk perbaikan rumah penduduk, pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, warga yang berada di kawasan rawan bencana diungsikan ke huntap (Hunian Tetap), yaitu warga Dusun Singlar, Dusun Glagah Malang, Dusun Ngancar dan Dusun Besalen. Terdapat 3 unit huntap di Desa Glagaharjo yang dibangun oleh pemerintah bagi warga yang rumahnya direlokasi, yaitu Huntap Banjarsari, Huntap Gading dan Huntap Jetis Sumur. Perbaikan ini dilakukan agar kesiapsiagaan pemulihan dapat dilaksanakan dengan lebih baik (*build back better*) dan dijalankan secara swadaya dengan dukungan pemerintah maupun pihak lain secara terencana dan terukur.

4.5 Interpretasi Data

4.5.1 Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo

Interpretasi data dilakukan berdasarkan hasil analisis jawaban yang diperoleh menggunakan panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan yang disusun oleh Pangarso Suryotomo, dkk (2019) yang terdiri dari 5 komponen, 28 indikator dan 112 pertanyaan. Komponen 1 kualitas dan akses layanan dan komponen 2 dasar sistem penanggulangan bencana merupakan indikator dasar atau pondasi untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan

baik. Komponen 3 pengelolaan risiko bencana, komponen 4 kesiapsiagaan darurat dan komponen 5 kesiapsiagaan pemulihan merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator ketangguhan desa/kelurahan menghadapi bencana (Suryotomo, 2019: 9).



Gambar 4.4 Grafik Persentase Keterlaksanaan Komponen Penilaian Ketangguhan Desa Glagaharjo

Mengacu pada hasil analisis data, hasil penilaian Destana di Desa Glagaharjo pada komponen 1 tentang kualitas dan akses layanan memperoleh nilai 31 dari nilai maksimal 36, atau setara dengan nilai persentase 86,11%. Pertanyaan nomor 4 pada indikator 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak mendapatkan jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 1 tentang kualitas dan akses layanan di Desa Glagaharjo masih ada 5 indikator yang tidak mencapai tahapan diseminasi dan advokasi.

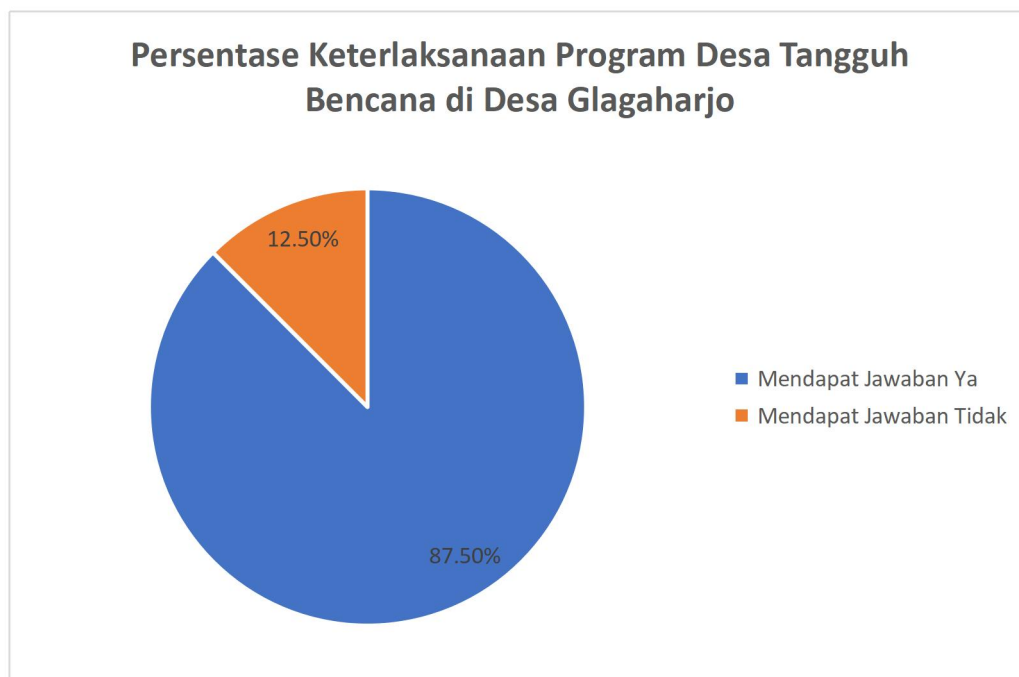
Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 2 tentang dasar dan sistem penanggulangan bencana memperoleh nilai 23 dari nilai maksimal 28, atau setara dengan nilai persentase 82,14%. Pertanyaan nomor 3 pada indikator 15 tidak mendapat jawaban “Ya” dan

Pertanyaan nomor 4 pada indikator 10, 11, 12 dan 15 tidak mendapat jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 2 tentang dasar sistem penanggulangan bencana di Desa Glagaharjo terdapat 1 indikator yang tidak mencapai aspek keberfungsian dan 4 indikator yang tidak mencapai tahapan diseminasi atau advokasi.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 3 tentang pengelolaan risiko bencana memperoleh nilai 8 dari nilai maksimal 8, atau setara dengan nilai persentase 100%. Artinya, pada komponen 3 tentang pengelolaan risiko bencana di Desa Glagaharjo telah terlaksana sepenuhnya sesuai panduan penilaian ketangguhan desa.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 4 tentang kesiapsiagaan darurat memperoleh nilai 29 dari nilai maksimal 32, atau setara dengan nilai persentase 90,62%. Pertanyaan nomor 2 pada indikator 22 tidak mendapatkan jawaban “Ya” dan pertanyaan nomor 4 pada indikator 22 dan 25 juga tidak mendapatkan jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 4 tentang kesiapsiagaan darurat di Desa Glagaharjo terdapat 1 indikator yang tidak mencapai aspek keberfungsian dan 2 indikator yang tidak mencapai tahapan diseminasi atau advokasi.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 5 tentang kesiapsiagaan pemulihan memperoleh nilai 7 dari nilai maksimal 8, atau setara dengan nilai persentase 87,5%. Pertanyaan nomor 4 pada indikator 27 tidak mendapatkan jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 5 tentang kesiapsiagaan pemulihan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai tahap diseminasi dan advokasi.

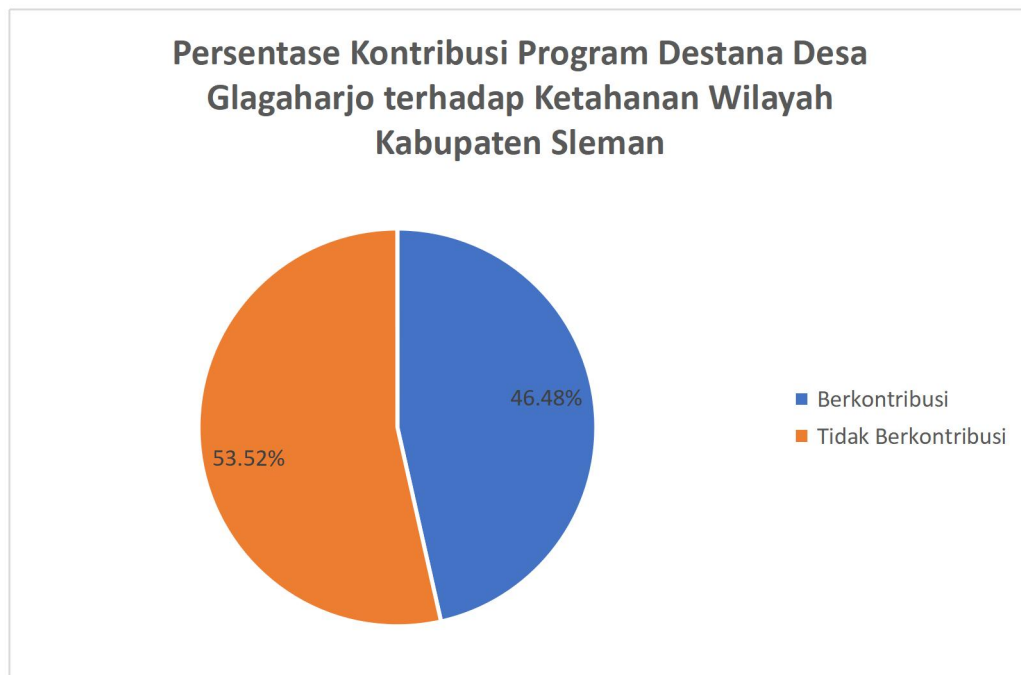


Gambar 4.5 Grafik Persentase Keterlaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengurangan risiko berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo berhasil menjawab 98 pertanyaan dari 112 pertanyaan dengan jawaban “Ya”. Jika dipersentasekan, Destana di Desa Glagaharjo telah melaksanakan 87,5% indikator ketangguhan desa/kelurahan. Maka dapat disimpulkan bahwa destana di Desa Glagaharjo memiliki kriteria sebagai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama.

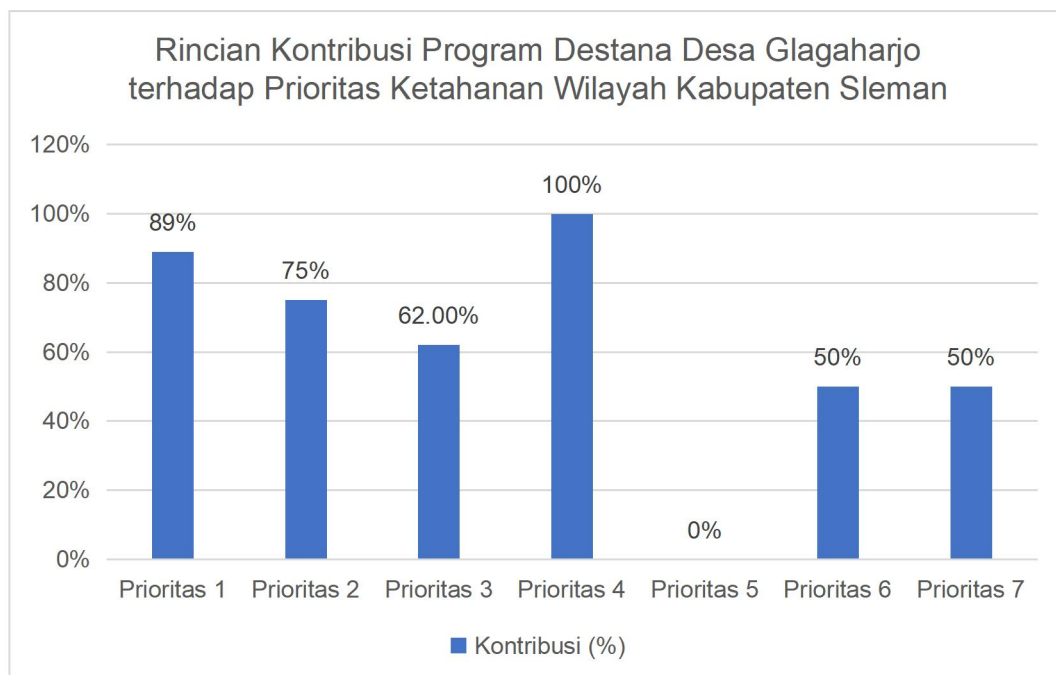
4.5.2 Implikasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan analisis data, program Destana di Glagaharjo berimplikasi terhadap 33 dari 71 indikator ketahanan wilayah Kabupaten Sleman, yaitu tepatnya pada prioritas 1, 2, 3, 4, 6 dan 7. Hal ini menunjukkan program Destana Desa Glagaharjo berkontribusi sebanyak total 46,48% terhadap aspek ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.



Gambar 4.6 Persentase Kontribusi Program Destana Desa Glagaharjo terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Jika dijabarkan lebih rinci, berikut ini rincian kontribusi pada masing-masing prioritas ketahanan wilayah Kabupaten Sleman:



Gambar 4.7 Rincian Kontribusi Program Destana Desa Glagaharjo terhadap Prioritas Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel 4.7, program pengurangan risiko bencana berbasis Destana di Desa Glagaharjo memberi implikasi positif terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Sleman di seluruh susunan prioritas, kecuali prioritas 5.

Pertama, pada prioritas 1, yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 89% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 8 dari 9 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen 2 di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu dasar sistem penanggulangan bencana. Prioritas ini berfokus pada semua bentuk kebijakan/regulasi/peraturan yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kedua, pada prioritas 2, yaitu pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 75% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 3 dari 4 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen 4 di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu mengenai kesiapsiagaan darurat, Fokus dari upaya pengurangan risiko bencana pada prioritas ini adalah ketersediaan peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan kajiannya di daerah, serta pada ketersediaan, proses penyusunan, dan pemanfaatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPD) di daerah.

Ketiga, pada prioritas 3, yaitu pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 75% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 8 dari 12 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen 3 di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang pengelolaan risiko bencana, Batasan prioritas ini yaitu

mengenai adanya sarana penyampaian informasi, sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi apapun terkait kebencanaan yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut serta harus didiseminasikan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, prioritas ini juga mengkaji tentang ketersediaan logistik kebencanaan mulai dari penyimpanan hingga pemeliharaan, serta kemampuan pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala.

Keempat, pada prioritas 4, yaitu penanganan tematik kawasan rawan bencana. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi penuh terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi keseluruhan 5 dari 5 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen pertama di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang adanya kualitas dan akses layanan dasar. Prioritas ini berfokus pada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana, ketersediaan Sekolah/Madrasah dan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, serta realisasi dari Desa Tangguh Bencana itu sendiri. Prioritas ini perlu dilakukan sebagai proses membangun ketangguhan yang berkelanjutan dan menjadikan budaya sadar bencana menjadi nilai-nilai dalam pembangunan di tingkat desa. Berdasar Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dari BNPB (2015), adanya pemenuhan akses layanan dasar dan infrastruktur dapat mempromosikan ketahanan masyarakat dan membantu pemulihan bencana. Hal ini sesuai dengan Maskrey (1998) yang menyatakan bahwa pengelolaan bencana seharusnya tidak hanya terbatas pada pendekatan fisik yang bersifat sesaat saja, namun harus dilakukan juga bersama dengan kehidupan sosio ekonomi masyarakat lokal yang terdampak secara berkelanjutan.

Kelima, pada prioritas 5, yaitu peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Program Destana di Desa Glagaharjo belum dapat memberikan implikasi terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman

pada prioritas ini, karena belum dapat memenuhi 12 indikator yang tercantum dalam Juknis IKD. Risiko ancaman bencana pada prioritas 5 tidak sesuai dengan ancaman bencana yang terdapat di Desa Glagaharjo, Prioritas ini berfokus pada mitigasi bencana banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan lahan pertanian. Sedangkan program Destana Desa Glagaharjo berfokus ke ancaman erupsi gunungapi yaitu Gunung Merapi. Hal ini dikarenakan letak geografis dan klimatologis Desa Glagaharjo memang berada di bagian lereng Merapi dengan jarak 4-5 km dari puncak, serta mengetahui fakta bahwa Desa Glagaharjo menjadi desa yang paling terdampak erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu, sehingga membuat Desa Glagaharjo menjadi KRB III.

Keenam, pada prioritas 6, yaitu perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 50% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 7 dari 14 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen keempat di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang kesiapsiagaan darurat. Fokus pada prioritas ini yang berkorelasi dengan penilaian Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan, khususnya di Desa Glagaharjo adalah adanya rencana kontingensi untuk ancaman erupsi gunungapi. Selain itu, prioritas ini juga menitikberatkan ketersediaan sistem peringatan dini, seperti adanya pemasangan EWS (*Early Warning System*) di Desa Glagaharjo. Sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya erupsi gunungapi, serta menimbulkan rasa aman di masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman erupsi gunungapi.

Ketujuh, pada prioritas 7, yaitu pengembangan sistem pemulihan bencana. Sama seperti prioritas 6, program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 50% terhadap ketahanan wilayah

Kabupaten Sleman dengan memenuhi 2 dari 4 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen terakhir atau kelima di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang kesiapsiagaan pemulihan. Adapun kesiapsiagaan pemulihan yang dimaksud berfokus pada adanya pemulihan pelayanan dasar pasca bencana, yang menitikberatkan pada keterlibatan aksi pemerintah maupun komunitas tentang ketersediaannya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pada saat pasca bencana untuk ancaman bencana. Sebagai desa berbasis Desa Tangguh Bencana, perwujudan program Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo mampu dilakukan secara mandiri yang dilaksanakan oleh Unitlak Kebencanaan dan dibantu oleh Komunitas Siaga Merapi (KSM).

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo

Bencana dapat terjadi pada komunitas masyarakat yang memiliki tingkat kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat ancaman yang ada. Tingkat kapasitas yang rendah memicu timbulnya kerentanan pada komunitas masyarakat. Kerentanan komunitas dipicu oleh kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang tidak aman yang melekat padanya. Tingkat kerentanan yang tinggi juga dapat menjadi salah satu sumber ancaman bencana, sehingga komunitas masyarakat yang sudah rentan dapat menjadi semakin rentan (Tilling, 2013, p. 144). Fenomena Bencana erupsi Gunung Merapi telah mengubah pola kehidupan masyarakat lereng Merapi, merugikan harta benda dan jiwa, dan merusak struktur sosial komunitas masyarakat dimana hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang disebutkan oleh Tilling (2013, p. 115).

Gunung Merapi yang terletak di dua provinsi, yaitu D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah secara konsisten terus memberikan ancaman erupsi, sehingga Gunung Merapi telah menjadi *Permanent Hazard*. Hal tersebut

diikuti dengan adaptasi masyarakat lereng merapi yang mengembangkan *local coping mechanism* terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi. Sehingga sesuai dengan teori Sindhunata (2010) dalam Maarif (2015) bahwa penduduk lereng Gunung Merapi telah memahami dan berusaha merespon fenomena Gunung Merapi tersebut. Bagi masyarakat lereng Gunung Merapi, ancaman merapi dimaknai sebagai ancaman yang mematikan, namun di sisi lain ia turut memberikan kesuburan dan kehidupan bagi mereka. Hasil penelitian Hasratul Hasfahiral (2012) menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan program destana, masyarakat sebenarnya sudah memiliki daya ketangguhan berupa daya informasi, daya proteksi dan daya adaptasi. Untuk dapat tangguh dalam menghadapi bencana, masyarakat hanya perlu dikembangkan pada bagian daya hindar (kesiapsiagaan) dan daya lenting.

Desa Glagaharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman adalah salah satu desa dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi, dibuktikan dengan seluruh wilayah desa masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sesuai dengan penjelasan Fadhli (2019, p. 112) Desa Glagaharjo masuk kedalam KRB II dan III, karena Desa Glagaharjo terletak dekat dengan sumber bahaya, dan pernah terkena awan panas, aliran lava, hujan abu dan lontaran batu. Oleh karena itu diperlukan usaha pengurangan risiko bencana (PRB) yang dapat menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas warga Desa Glagaharjo terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi. Hal tersebut sesuai dengan arahan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (SFDDR 2015-2030), dimana fokus pengelolaan bencana kedepan akan berprioritas pada peningkatan *community awareness and preparedness* (kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat) yang dapat meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan (Adiyoso dan Kusumaningtyas, 2018, p. 98). Subiyanto *et al* (2018, p. 288) turut menjelaskan bahwa paradigma penanggulangan bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran dari penanggulangan

yang terfokus pada ketanggapan darurat dan pemulihan (*responsif*) ke pengurangan risiko dan kesiapsiagaan (*preventif*).

Salah satu perwujudan dari arahan SFDDR 2015-2030 tersebut adalah pembentukan desa tangguh bencana (Destana). Destana merupakan konsep desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No 1 Tahun 2012). Ketangguhan yang dimaksud adalah ketangguhan untuk berikhtiyar. Makna dari berikhtiyar tersebut adalah bahwa tidak ada jaminan bahwa desa tangguh bencana (Destana) ketika menerima bencana tidak akan mengalami korban jiwa atau kerugian, namun setidaknya desa tersebut sudah berusaha seoptimal mungkin dalam mengurangi Risiko bencana yang muncul (Suryotomo *et al*, 2019, p. 2). Program Destana di Desa Glagaharjo telah sesuai dengan konsep pengurangan risiko bencana (PRB) menurut Susanti (2018) yaitu upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Program Destana Desa Glagaharjo juga telah menerapkan konsep PRB yang dijelaskan oleh Zahrah (2018), yaitu 1) menghindari (pencegahan), 2) membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan), dan 3) mengurangi dampak yang merugikan.

Mengacu pada dokumen rencana kontingensi, tujuan utama program Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Glagaharjo terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi. Hal tersebut telah sesuai dengan konsep PRB yang dijelaskan oleh Maarif (2012b, p.3), yaitu Penekanan utama pada pengurangan risiko bencana adalah dengan mengelola kerentanan dan kapasitas manusianya . Oleh karena itu, tujuan utama dari PRB adalah untuk meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan *stakeholders* dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar lebih berdaya (Djalante dan Garschagen, 2017).

Terdapat 5 komponen dan 28 indikator dalam penilaian keterlaksanaan program desa tangguh bencana. Komponen 1 dan 2 merupakan indikator dasar/pondasi untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan baik. Komponen 1 dan 2 menjadi kunci bahwa komponen berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Komponen 3, 4 dan 5 merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat. Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator, dan setiap indikator terdiri dari 4 pertanyaan yang memiliki tingkatan yang berbeda. Setiap tingkatan memiliki kecenderungan masing-masing. Pertanyaan 1 menunjukkan keberadaan dasar, pertanyaan 2 tentang keberfungsian, pertanyaan 3 tentang proses evaluasi dan refleksi, dan pertanyaan 4 tentang diseminasi dan advokasi. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana (Destana) di Desa Glagaharjo adalah sebagai berikut:

4.6.1.1 Kualitas dan Akses Layanan Dasar

Dapat kita sadari bahwa manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan hidup dasar yang terdiri dari pangan, sandang dan papan. Untuk menunjang tercukupinya kebutuhan dasar tersebut, manusia perlu melakukan beberapa usaha seperti memperoleh akses pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan publik, informasi, perlindungan, dan kebutuhan budaya-spiritual. Jika kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi, maka manusia dapat memikirkan dan mempersiapkan hal lain terutama terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana (Suryotomo *et al*, 2019, p. 4). Oleh karena itu, pada komponen 1 penilaian ketangguhan desa, dilakukan penilaian terhadap kualitas dan akses terhadap layanan dasar tersebut. Desa yang tangguh adalah desa yang dapat memberikan akses layanan dasar yang mudah bagi masyarakatnya. Pada komponen 1 tentang kualitas dan akses layanan dasar terdapat 9 indikator, yaitu indikator nomor 1 – 9.

Indikator 1 membahas tentang ketersediaan fasilitas pendidikan formal dan/atau nonformal dengan kualitas yang baik dan mudah dicapai oleh masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mewujudkannya dibutuhkan fasilitas pendidikan formal/nonformal yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Desa Glagaharjo telah memiliki fasilitas pendidikan formal pada tingkat PAUD, SD dan TK, namun pada tingkat SMP dan SMA belum memiliki. Desa Glagaharjo juga telah membuat berbagai program peningkatan fasilitas pendidikan dan selalu mengadakan evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan pendidikan di desa. Desa juga turut berpartisipasi aktif dalam melakukan usulan peningkatan dana pendidikan ke pemerintah kabupaten.

Indikator 2 membahas tentang fasilitas pelayanan kesehatan dengan kualitas yang baik dan mudah dicapai oleh masyarakat. Kualitas layanan kesehatan yang baik berpengaruh pada ketangguhan desa menghadapi bencana. Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dengan dukungan program-program layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sudah semestinya mudah diakses oleh masyarakat.

Indikator 3 membahas tentang sarana prasarana transportasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sarana prasarana transportasi yang tangguh dibutuhkan untuk menjamin proses evakuasi dan distribusi kebutuhan dasar/logistik pada saat kejadian bencana. Disamping itu, sarana prasarana transportasi yang tangguh akan mempercepat aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan

Indikator 4 membahas tentang pelayanan publik yang baik. Keberadaan pelayanan publik bergantung kepada ketersediaan sarana publik (Misal: lapangan, gedung aula, barak pengungsian, dll) di masyarakat. Sarana pelayanan publik yang baik seharusnya mampu mendukung program-program pembangunan ketangguhan di masyarakat.

Indikator 5 membahas tentang ketersediaan sistem informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa secara cepat. Ketersediaan sistem informasi yang baik berpengaruh pada ketangguhan desa menghadapi bencana. Sistem informasi yang baik, seharusnya mudah diakses, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung program-program ketangguhan masyarakat.

Indikator 6 membahas tentang penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang mandiri dan sumber daya manusia yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan desa baik bergantung pada kemandirian aparatur desa. Peningkatan kemandirian aparatur desa perlu dilakukan melalui pembangunan sistem (SOP, mekanisme) dan peningkatan kualitas SDM dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Indikator 7 membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Kualitas lingkungan hidup yang baik seharusnya terlihat dari program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di masyarakat (misal: reboisasi, sistem pengelolaan sampah, dll)

Indikator 8 membahas tentang penguatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana adalah tertanamnya budaya siaga bencana di masyarakat. Untuk itu penanggulangan bencana harus mampu melindungi dan berasimilasi (berbaur) dengan nilai-nilai budaya maupun spiritual yang ada di masyarakat.

Indikator 9 membahas tentang perlindungan keamanan masyarakat. Membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan keamanan bagi masyarakat. Untuk itu, program-program perlindungan keamanan

masyarakat yang baik dapat saling mendukung dalam peningkatan ketangguhan masyarakat.

4.6.1.2 Dasar Sistem Penanggulangan Bencana

Kegiatan penanggulangan bencana di suatu wilayah dapat berjalan dengan baik jika wilayah tersebut memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung kegiatan penanggulangan bencana tersebut. Wilayah tersebut juga harus memiliki dokumen pendukung yang berisi upaya penanggulangan bencana (dokumen rencana kontingensi, dokumen kajian Risiko, dll) agar dapat menciptakan kesiapsiagaan di masyarakat dalam menghadapi bencana (Suryotomo *et al*, 2019, p. 23). Pada komponen 2 tentang dasar sistem penanggulangan bencana terdapat 7 indikator, yaitu indikator nomor 10 – 16.

Indikator 10 membahas tentang kebijakan pendukung dalam upaya pengelolaan risiko bencana bencana di desa. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dibutuhkan regulasi dan aturan yang jelas. Aturan tersebut mampu mengakomodir dan melindungi penggunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana.

Indikator 11 membahas tentang ketersediaan regulasi desa untuk pengelolaan risiko bencana dalam suatu kawasan. Penyebab terjadinya bencana suatu desa bisa saja berasal dari desa tetangga. Kejadian bencana pun juga dapat menimpa desa ini dan desa-desa tetangga secara bersamaan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pengurangan risiko bencana yang disusun bersama-sama dengan desa-desa tetangga.

Indikator 12 membahas tentang keterlaksanaan pengkajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim desa secara berkala dan berkelanjutan. Kajian risiko bencana merupakan dasar seluruh sistem perencanaan penanggulangan bencana. Untuk itu hasil kajian risiko bencana perlu dimasukkan sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan desa agar pengurangan risiko

bencana dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Perubahan iklim mempengaruhi peningkatan risiko dan intensitas kejadian bencana. Oleh karena itu Pengkajian risiko bencana perlu dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak perubahan iklim di desa/kelurahan.

Indikator 13 membahas tentang rencana penanggulangan bencana desa yang menjadi bagian perencanaan pembangunan pada pemerintahan vertikal. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di tingkat Desa, RPB disusun agar mampu memastikan penanggulangan bencana sebagai salah satu program prioritas di dalam RPJM Desa. Dengan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJM Desa, maka penanggulangan bencana dapat diintegrasikan kepada perencanaan pembangunan pada pemerintah di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional).

Indikator 14 membahas tentang dukungan lembaga luar untuk pengelolaan risiko bencana yang sesuai dengan rencana pembangunan desa atau rencana strategis kelurahan. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen hendaklah digalang. Partisipasi dari lembaga di luar desa, dapat dibangun agar mampu mendukung rencana strategis maupun rencana pembangunan desa.

Indikator 15 membahas tentang penyelarasan rencana penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim antar desa dalam suatu kawasan. Bencana yang terjadi di desa ini juga dapat terjadi di desa tetangga dan pada waktu yang berdekatan. Oleh karena itu Rencana Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim perlu diselaraskan dengan desa-desa tetangga agar risiko bencana dapat ditanggulangi dengan lebih maksimal.

Indikator 16 membahas tentang optimalisasi peran serta forum pengelolaan risiko bencana desa atau kelurahan dalam mewujudkan rencana pembangunan desa atau rencana strategis kecamatan untuk

kelurahan. Forum PRB Desa berfungsi sebagai salah satu alat advokasi untuk mempercepat implementasi kesiapsiagaan bencana di tingkat pemerintah desa maupun masyarakat.

4.6.1.3 Pengelolaan Risiko Bencana

Pengelolaan risiko bencana dapat terwujud apabila memang benar-benar terdapat aksi terpadu dalam mengelola risiko tersebut di lapangan yang didampingi dengan upaya peningkatan wawasan dan keterampilan mengelola risiko bencana tersebut. Kebijakan dan regulasi hanya menjadi sebuah tulisan semata jika tidak ada wujud aksi nyata di lapangan (Suryotomo *et al*, 2019, p. 39). Komponen 3 tentang pengelolaan risiko bencana terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator nomor 17 dan 18.

Indikator 17 membahas tentang adanya aksi terpadu pengelolaan risiko bencana antara desa dalam suatu kawasan. Kegiatan atau aksi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada penyebab yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak. Penyebab kejadian bencana dapat bersumber pada desa-desa terdekat, sehingga pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kerjasama dengan desa-desa tetangga.

Indikator 18 membahas tentang peningkatan wawasan dan keterampilan untuk mengelola risiko bencana melalui edukasi, sosialisasi dan literasi kebencanaan. Edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan perlu diarahkan kepada penggunaan riset-riset terapan, sehingga dapat langsung diaplikasikan di tingkat masyarakat. Bersamaan dengan itu, peningkatan wawasan dan keterampilan masyarakat perlu ditingkatkan agar mampu menerapkan hasil-hasil riset/penelitian, sehingga dapat mengurangi risiko bencana secara optimal.

4.6.1.4 Kesiapsiagaan Darurat

Bencana cenderung terjadi pada komunitas masyarakat yang rentang dan akan membuat komunitas masyarakat tersebut semakin rentan. Salah satu wujud nyata pengurangan kerentanan tersebut adalah dengan mewujudkan kesiapsiagaan bencana di komunitas masyarakat tersebut (Tilling, 2013, p.144). Suryotomo *et al* (2019) dalam dokumennya menjelaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Kesiapsiagaan menjadi wujud ikhtiyar yang bermakna bahwa tidak ada jaminan bahwa desa tangguh bencana (Destana) ketika menerima bencana tidak akan mengalami korban jiwa atau kerugian, namun setidaknya desa tersebut sudah berusaha seoptimal mungkin dalam mengurangi risiko bencana yang muncul (p, 2). Komponen 4 tentang kesiapsiagaan darurat terdiri dari 8 indikator, yaitu indikator nomor 19 – 26.

Indikator 19 menjelaskan tentang ketersediaan mekanisme pendeksian dini kemungkinan terjadinya bencana pada skala desa. Untuk mendeteksi bencana skala lokal (luas daerah terdampak kecil dan terbatas), desa/kelurahan idealnya memiliki mekanisme untuk mendeteksi kemungkinan kejadian tersebut secara mandiri. Pendeteksian biasanya dilaksanakan oleh kelompok khusus yang ditunjuk berdasarkan informasi dari warga.

Indikator 20 menjelaskan tentang ketersediaan mekanisme penerimaan peringatan dini dan/atau perintah evakuasi. Beberapa jenis bencana berskala luas seperti tsunami dan letusan gunungapi, memiliki mekanisme peringatan dini yang dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk bencana tersebut, pemerintah pusat memberikan peringatan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Peringatan dini yang sampai ke pemerintah kabupaten/kota akan diputuskan oleh kepala daerah atau lembaga daerah yang ditunjuk untuk memutuskan dikeluarkannya perintah evakuasi atau tidak. Setelah perintah evakuasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka informasi tersebut disebar kepada seluruh masyarakat.

Indikator 21 menjelaskan keberfungsian mekanisme penyebaran arahan evakuasi yang mudah diakses dan dipahami semua pihak termasuk kelompok rentan. Sistem peringatan dini bencana dapat mengeluarkan 2 bentuk informasi:

- 1) Peringatan: perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah menjadi perintah evakuasi (misal: sistem peringatan dini bencana tsunami, gunungapi). Alat penyebaran peringatan biasanya bersifat terbatas untuk level kepala daerah.
- 2) Perintah/Arahan Evakuasi: untuk bencana skala lokal dapat langsung memberikan perintah evakuasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman (misal: sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, dll). Alat penyebaran perintah/arahan evakuasi yang tersedia di desa melayani seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan (lansia, tuli, buta, dsb.).

Indikator 22 membahas tentang ketersediaan peta rencana evakuasi masyarakat yang dapat digunakan sebelum dan saat bencana terjadi. Pengungsian masyarakat membutuhkan perencanaan evakuasi. Untuk mempermudah memahaminya, rencana evakuasi dibuat dalam bentuk Peta. Peta rencana evakuasi biasanya digunakan untuk latihan pengungsian masyarakat. Peta rencana evakuasi dapat tersambung dengan peta rencana evakuasi desa tetangga. Daerah aman pada peta rencana evakuasi desa tetangga mungkin saja berada di desa ini ataupun sebaliknya.

Indikator 23 membahas tentang tempat evakuasi. Rencana evakuasi berakhir pada Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA). TES digunakan untuk pengungsian sementara saat daerah aman tidak bisa dicapai. Fasilitas yang ada dalam TES memungkinkan untuk seluruh masyarakat pengungsi selamat hingga kejadian bencana berakhir. TES mungkin saja juga digunakan oleh masyarakat desa tetangga sesuai dengan rencana evakuasinya.

Indikator 24 membahas tentang jalur dan rambu evakuasi. Jalur evakuasi dibutuhkan untuk memastikan seluruh masyarakat desa sampai di tempat evakuasi/pengungsian dengan aman dan selamat. Rambu evakuasi berfungsi sebagai pemandu agar masyarakat menempuh jalur evakuasi yang benar sesuai rencana evakuasi.

Indikator 25 membahas tentang latihan kesiapsiagaan bencana secara berkala dan berkelanjutan pada tingkat desa. Latihan kesiapsiagaan bencana di Desa Glagaharjo terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan latihan.

- 1) Tingkatan Pelatihan: Seminar dan Lokakarya yang ditujukan untuk menyatukan ide serta membangun prosedur.
- 2) Tingkatan Simulasi: Geladi Ruang, Permainan dan Drill (Uji coba sampai berhasil); ditujukan untuk menguji sekumpulan atau satu prosedur atau tindakan yang dinilai penting.
- 3) Tingkatan Uji Sistem: Geladi Posko dan Geladi Lapangan, ditujukan untuk menguji keseluruhan prosedur dan/atau tindakan yang dibutuhkan.

Kesiapsiagaan bencana tingkat desa/kelurahan diarahkan kepada penyebaran peringatan dini dan penanganan masa-masa awal kejadian bencana hingga petugas pemerintah kabupaten/kota memberikan bantuan penanganan secara komprehensif.

Indikator 26 membahas tentang tentang ketersediaan relawan penanggulangan bencana desa yang memiliki kemampuan dalam melakukan penanganan darurat bencana. Relawan adalah individu yang membaktikan berbagai sumber daya yang dimilikinya (SDM, anggaran, metode, peralatan, mekanisme) untuk suatu tujuan. Dalam penanganan darurat bencana, relawan bukan hanya membaktikan sumber dayanya, namun juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk suatu penugasan.

4.6.1.5 Kesiapsiagaan Pemulihan

Berdasarkan Perka BNPB No 1 Tahun 2012 dijelaskan bahwa desa tangguh bencana (Destana) adalah konsep desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan sedera dari dampak bencana yang merugikan. Wujud dari ketangguhan adalah ulet dan mampu beradaptasi dengan kondisi baru, kemampuan beradaptasi merupakan salah satu aspek dalam pemulihan bencana (Suryotomo *et al*, 2019, p. 65). Aspek pemulihan bencana merupakan nilai penting dalam menunjang ketangguhan desa. Komponen 5 tentang kesiapsiagaan pemulihan terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator nomor 27 dan 28.

Indikator 27 membahas tentang ketersediaan berbagai mekanisme yang ditujukan untuk upaya pemulihan dini bencana di tingkat desa. Dampak negatif bencana memerlukan penanganan pemulihan yang segera dan tepat. Untuk itu diperlukan mekanisme dan rencana pemulihan dini bencana yang menghindari risiko baru.

Indikator 28 membahas tentang perencanaan pemulihan berkelanjutan untuk berbagai aset dan properti strategis yang berisiko tinggi rusak terkena bencana. Upaya pemulihan dampak bencana perlu mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemulihan tidak kembali hancur/rusak terkena bencana sejenis dan bencana lainnya pada masa datang.

Maarif (2015) menjelaskan bahwa sekitar 80% penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang terkena bencana. Masyarakat setempat merupakan penanggap pertama (*the first responder*) dalam menghadapi bencana tersebut dan bantuan pemerintah atau lembaga eksternal lainnya selalu datang belakangan (p. 8). Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana dapat diperkecil dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Lebih jauh jika dianalisis bahwa sebuah kondisi disebut bencana bila masyarakat yang terpapar ancaman tidak mempunyai kapasitas untuk

menanggulangnya, dimana kerentanan yang muncul sebagian besar ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri (Maarif, 2015, p. 8). Sehingga, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) dinilai penting dan efektif untuk mengurangi dampak dari bencana.

Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Glagaharjo merupakan salah satu perwujudan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), karena telah melibatkan pihak/kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan pengelolaan bencana sesuai dengan penjelasan Maarif (2015, p. 11) pada dasar teori. Destana di Desa Glagaharjo juga sudah sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Abarquez dan Murshed (2004), bahwa PRBBK adalah sebuah kegiatan dimana masyarakat secara aktif terlibat dalam identifikasi, analisis, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan kapasitas mereka.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, dan pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan (Widana, 2019, p. 142). Dengan demikian sebuah desa atau kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan

peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012).

Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo dalam penerapannya terdapat partisipasi penuh yang melibatkan berbagai pihak rentan seperti kelompok lansia dan orang berkebutuhan khusus. Penerapan destana di Desa Glagaharjo bersifat *bottom-up*, karena kekuasaan masyarakat Desa Glagaharjo memiliki akses dan kontrol secara penuh terhadap program tersebut menyesuaikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi mereka. Pendekatan inklusif *sense of belonging* juga diterapkan oleh pemerintah Desa Glagaharjo dalam melaksanakan program dengan mengajak seluruh komponen masyarakat dari usia muda hingga lanjut usia untuk turut serta melaksanakan program destana. Sehingga penerapan destana di Desa Glagaharjo telah sesuai dengan konsep PRBBK yang dijelaskan oleh Twigg dan Lavell (2006) yang menjelaskan bahwa makna PRBBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya partisipasi penuh yang melibatkan pula partisipasi pihak rentan, seperti anak-anak, kelompok lanjut usia, orang-orang yang berkebutuhan khusus, ras marjinal, dan sebagainya;
- b. Sinonim dengan *bottom-up* bukan *top-down*, partisipasi penuh, akses dan kontrol, pendekatan inklusif *sense of belonging* terhadap sistem penanganan bencana yang sudah, sedang, dan akan dibangun. Pendekatan *top-down* pada awal kegiatan memungkinkan untuk dilakukan, namun seiring waktu, masyarakat disiapkan untuk dapat mandiri, sehingga mekanisme *bottom-up* dapat lebih dominan;
- c. Menggunakan konsep “dari, oleh, dan untuk” masyarakat dalam keseluruhan proses, di mana masyarakat yang mengontrol sistem dan bukan dikontrol sistem.

Pada intinya tujuan utama PRBBK adalah mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu rumah tangga, dan komunitas dalam mengelola risiko

bencana, menghadapi dampak merusaknya bencana. Komunitas dan kelompok paling rentan adalah aktor utama/kunci dalam PRBBK dan pihak luar (LSM lokal dan internasional), lembaga-lembaga PBB, dan lembaga lainnya) berperan mendukung dan mengambil peran fasilitasi seperti membantu analisis situasi, mengukur tingkat perencanaan dan implementasi agenda ataupun konsensus, PRBBK (Widana, 2019, p. 137).

Pelaksanaan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo sudah tercakup dalam Rencana Pembangunan, baik dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM) Desa Glagaharjo dan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Desa Glagaharjo. Penelitian Fitri Oknaini (2013) menjelaskan bahwa program pengurangan risiko bencana yang tepat untuk kawasan lereng Merapi untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana harus mampu diintegrasikan dengan program pembangunan desa. Sehingga program destana di Desa Glagaharjo dapat dikatakan sudah terlaksana dengan tepat. Secara garis besar Destana di Desa Glagaharjo memiliki komponen-komponen yang sesuai dengan Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012, yaitu:

a. Legislasi.

Penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

b. Perencanaan

Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan).

c. Kelembagaan

Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok atau tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan

kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.

d. Pendanaan

Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten atau Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).

e. Pengembangan kapasitas

Pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan nonfisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun nonstruktural.

Berdasarkan panduan penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan yang disusun oleh Pangarso Suryotomo, dkk (2019), destana Desa Glagaharjo memperoleh persentase keterlaksanaan komponen penilaian ketangguhan seperti pada Gambar 4.4. Mengacu pada Gambar 4.4 hasil penilaian Destana di Desa Glagaharjo pada komponen 1 tentang kualitas dan akses layanan memperoleh nilai 31 dari nilai maksimal 36, atau setara dengan nilai persentase 86,11%. Pertanyaan nomor 4 pada indikator 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak mendapatkan jawaban "Ya". Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 1 tentang kualitas dan akses layanan di Desa Glagaharjo masih ada 5 indikator yang tidak mencapai tahapan diseminasi dan advokasi.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 2 tentang dasar dan sistem penanggulangan bencana memperoleh nilai 23 dari nilai maksimal 28, atau setara dengan nilai persentase 82,14%. Pertanyaan nomor 3 pada indikator 15 tidak mendapat jawaban “Ya” dan Pertanyaan nomor 4 pada indikator 10, 11, 12 dan 15 tidak mendapat jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 2 tentang dasar sistem penanggulangan bencana di Desa Glagaharjo terdapat 1 indikator yang tidak mencapai aspek keberfungsian dan 4 indikator yang tidak mencapai tahapan diseminasi atau advokasi.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 3 tentang pengelolaan risiko bencana memperoleh nilai 8 dari nilai maksimal 8, atau setara dengan nilai persentase 100%. Artinya, pada komponen 3 tentang pengelolaan risiko bencana di Desa Glagaharjo telah terlaksana sepenuhnya sesuai panduan penilaian ketangguhan desa.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 4 tentang kesiapsiagaan darurat memperoleh nilai 29 dari nilai maksimal 32, atau setara dengan nilai persentase 90,62%. Pertanyaan nomor 2 pada indikator 22 tidak mendapatkan jawaban “Ya” dan pertanyaan nomor 4 pada indikator 22 dan 25 juga tidak mendapatkan jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 4 tentang kesiapsiagaan darurat di Desa Glagaharjo terdapat 1 indikator yang tidak mencapai aspek keberfungsian dan 2 indikator yang tidak mencapai tahapan diseminasi atau advokasi.

Hasil penilaian destana di Desa Glagaharjo pada komponen 5 tentang kesiapsiagaan pemulihan memperoleh nilai 7 dari nilai maksimal 8, atau setara dengan nilai persentase 87,5%. Pertanyaan nomor 4 pada indikator 27 tidak mendapatkan jawaban “Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada komponen 5 tentang kesiapsiagaan pemulihan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai tahap diseminasi dan advokasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengurangan risiko berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo berhasil menjawab 98

pertanyaan dari 112 pertanyaan dengan jawaban “Ya”. Jika dipersentasekan, Destana di Desa Glagaharjo telah melaksanakan 87,5% indikator ketangguhan desa/kelurahan. Maka dapat disimpulkan bahwa destana di Desa Glagaharjo memiliki kriteria sebagai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama.

Mengacu pada penelitian terdahulu, Setyawati (2018) menjelaskan bahwa program destana di Kecamatan Cangkringan memiliki tingkat efektifitas yang baik karena telah mencapai sasarannya yaitu masyarakat, pemerintah dan komunitas yang menjadi lebih sadar terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana. Hasil penelitian Wahyuni & Sakir (2021) turut menjelaskan bahwa bahwa pelaksanaan PRB di daerah rawan bencana Kecamatan Cangkringan sudah terlaksana dengan cukup baik. Kecamatan Cangkringan telah memiliki penataan ruang, jalur evakuasi, *early warning system* dan area pembangunan huntap dan barak yang mencukupi. Selain itu, kegiatan penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan sekolah siaga bencana dan kesiapan infrastruktur juga sudah cukup baik.

Hasil penelitian Wiji Lestari (2014) menjelaskan bahwa desa dengan kriteria sebagai desa tangguh bencana utama bukanlah jaminan bahwa ketangguhan masyarakat tersebut lebih baik dari ketangguhan masyarakat di desa dengan kriteria desa tangguh bencana madya. Faktor-faktor yang berpengaruh pada ketangguhan masyarakat adalah modal sosial, agama dan pemerintah desa. Sehingga program destana di Desa Glagaharjo harus senantiasa dikembangkan, jangan sampai ketika sudah mencapai kriteria sebagai destana utama membuat destana Desa Glagaharjo terlena yang justru dapat menurunkan kapasitas.

4.6.2 Implikasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Sleman

Menurut Islamy (2003, p. 114), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dari adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tertentu. Silalahi (2005, p. 43) dalam bukunya mengatakan bahwa implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah program yang disusun oleh BNPB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Suryotomo *et al*, 2019, p. 3). Program Destana menjadi salah satu upaya strategi untuk mewujudkan visi BNPB yaitu “Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”.

Proses dan upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat di Desa Glagaharjo dalam mengurangi risiko bencana berbasis Destana telah dilakukan dengan berbagai cara. Sejauh ini, proses tersebut memberikan implikasi positif dalam mendukung terciptanya kondisi dinamik yang meliputi segenap aspek kehidupan terintegrasi yang mampu menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan dari dalam maupun luar. Dengan kata lain, Desa Glagaharjo sebagai salah satu Desa Tangguh Bencana di Sleman turut mendukung terbentuknya ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.

Ketahanan wilayah adalah rangkaian dari delapan aspek ketahanan nasional dalam lingkup wilayah yang dikenal dengan Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra yang meliputi aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta Pancagatra yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Lemhannas, 1997). Ketahanan

wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional. Setiap aspek pada ketahanan wilayah tersebut akan memiliki dampak terhadap ketahanan nasional sebagai bentuk ketahanan yang sebenarnya, sehingga stabilitas ketahanan wilayah sangat diperlukan (Alfaqi, Habidi dan Rapita, 2017, p. 325).

Masing-masing aspek ketahanan wilayah menggunakan pendekatan Astagatra disertai pembahasan bagaimana Desa Glagaharjo turut berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana berbasis Desa Tangguh Bencana berdasarkan Astagatra dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Gatra Geografi. Aspek geografi dalam Astagatra merupakan bagian dari *Trigatra*. Kedudukan Desa Glagaharjo sesuai letak geografis berada di bagian lereng atas Gunung Merapi, tepatnya pada ketinggian 635 mdpl dan berjarak 4 sampai 5 km dari puncak Gunung Merapi. Bentuk lahan di Desa Glagaharjo dipengaruhi oleh relief berbukit dengan material penyusun dari endapan piroklastik dan merupakan bagian lereng dari tubuh gunungapi di bawah kerucut Gunung Merapi. Posisi tersebut membuat Desa Glagaharjo menjadi salah satu desa yang terkena ancaman erupsi Gunung Merapi, terutama mengetahui bahwa Desa Glagaharjo adalah kawasan KRB III, yaitu kawasan yang berpotensi tinggi terdampak awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, dan hujan abu dari Gunung Merapi. Desa Glagaharjo mempunyai luas wilayah 1340 ha yang terbagi menjadi beberapa penggunaan lahan meliputi bangunan, tanah kering, dan tanah lainnya. Berikut ini rincian penggunaan lahan di Desa Glagaharjo dibagi menjadi berikut:

- a. Untuk sawah pertanian seluas 264,88 Ha
- b. Untuk tegalan dan pekarangan seluas 745,1 Ha
- c. Bangunan dan halaman seluas 274,847 Ha
- d. Jalan dan kali seluas 12 Ha

Melihat letak geografis Desa Glagaharjo tersebut mempengaruhi terhadap cara penanggulangan bencana. Pengembangan Desa Tangguh

Bencana (Destana) menjadi salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Desa Glagaharjo. Keterlibatan pemerintah desa sebagai perencana, pelaksana, dan pelaku utama program Destana di Desa Glagaharjo dapat melakukan berbagai macam strategi untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat di desa. Setelah pemerintah desa menyusun dokumen rencana kontingensi, pengkajian risiko bencana di Desa Glagaharjo dapat dievaluasi lebih lanjut untuk mengurangi risiko bencana erupsi Gunung Merapi. Hasil kajian pada dokumen rencana kontingensi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penurunan perencanaan pembangunan desa terkait pengembangan wilayah, pembuatan alur evakuasi, saranan prasarana kebencanaan dan fasilitas umum kebencanaan. Selain itu, peran dari Komunitas Siaga Merapi (KSM) sebagai komunitas aktif relawan kebencanaan di Desa Glagaharjo memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyediakan mekanisme untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya bencana, sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat pada skala desa/kelurahan dan memberi implikasi terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.

Kedua, Gatra Demografi. Aspek demografi adalah aspek yang terkait dengan kekuatan dukungan dalam hal karakteristik demografis. Karakteristik demografi dapat digunakan sebagai prediktor ketahanan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti faktor usia, jenis kelamin, status ekonomi, komposisi penduduk, rasio ketergantungan, migrasi, kepadatan, persebaran penduduk, dsb. Sebagai bagian dari *Trigatra* dalam Astagatra yang berfokus pada aspek alamiah, demografi berkaitan dengan kependudukan baik dalam kualitas, kuantitas, pertumbuhan, komposisi, kesejahteraan maupun persebaran penduduk. Data sebaran penduduk Desa Glagaharjo sebagian besar berada pada usia rentan yaitu 60 tahun ke atas dengan jumlah 785 jiwa. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat Desa Glagaharjo, sehingga perlu adanya tindak lanjut dan evaluasi yang ketat mengenai peningkatan

pelayanan dan sarana prasarana khusus bagi lansia untuk mengurangi kerentanan desa. Peran Puskesmas dan kader Posyandu menjadi kunci dalam menurunkan kerentanan penduduk rentan berkaitan dengan bidang kesehatan.

Faktor demografi lain yang mempengaruhi ketahanan wilayah adalah jumlah masyarakat yang berada di usia produktif. Sebagian besar penduduk Desa Glagaharjo didominasi oleh usia produktif yaitu 25-59 tahun. Pemerintah Desa Glagaharjo dalam praktiknya telah melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Namun, berdasarkan evaluasi, tahun 2020 lalu masih banyak pekerjaan yang tumpang tindih, ini terjadi karena banyak pengurus yang sudah berumur dan cenderung resisten akan perubahan karena masih terbawa oleh budaya yang dahulu. Menghadapi hal tersebut, melalui program Destana, Desa Glagaharjo dapat mengurangi beban desa dengan cara penyesuaian pekerjaan sesuai dengan porsi dan beban kerja masing-masing dan meningkatkan lapangan pekerjaan ke masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, sektor pendidikan, pelatihan dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi fokus dalam pembangunan Desa Glagaharjo pada aspek demografi ini.

Ketiga, Gatra Sumber Daya Alam. Aspek sumber daya alam berasal dari seluruh sumber kekayaan alam baik di permukaan bumi, laut dan udara selama dalam wilayah yurisdiksinya. Konsumsi sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengurangi efektivitas perkembangan ekosistem. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko bencana, dan pada gilirannya, bahaya alam dapat semakin merusak lingkungan. Untuk meningkatkan ketangguhan bencana, perencanaan penanggulangan kedaruratan harus didasarkan pada risiko dan terintegrasi dengan perencanaan strategis pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, Desa Glagaharjo memiliki berbagai macam program seperti adanya program penataan

lahan pertanian di tanah kas desa, pengelolaan dan pemeliharaan sumber mata air desa, pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan), serta pembinaan dan pelatihan Kelompok Tani. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.

Keempat, Gatra Ideologi, yang merupakan bagian pertama dari aspek sosial di Pancagatra. Ideologi sangat mempengaruhi cara individu maupun masyarakat berperilaku dan memandang kehidupan. Dasar hukum ketahanan nasional terdiri dari seperangkat aturan/kebijakan yang dibuat atas dasar Pancasila, terkait dengan ketahanan negara, khususnya Pancasila sila ketiga yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideologi, ekonomi, sosial budaya, patriotisme nilai, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, dan kesediaan untuk berkorban dalam ketahanan bangsa dan negara. Ketahanan ideologi di skala desa/kelurahan dapat diwujudkan melalui perkembangan ideologi masyarakat, kemajemukan masyarakat dan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Melalui program Destana, pemerintah Desa Glagaharjo rutin melakukan pengelolaan risiko bencana melalui edukasi, sosialisasi dan literasi kebencanaan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak luar. Program yang pernah dilakukan yaitu diantaranya pelatihan kebencanaan di Desa Glagaharjo oleh BPBD Sleman dan pemberian pelatihan pertolongan pertama bagi korban bencana oleh PMI Sleman. Di samping itu, peran komunitas relawan di desa seperti KSM menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman pra, saat, dan pasca bencana. KSM melakukan program kerja rutin berbentuk pelatihan mitigasi bencana dan sosialisasi kepada warga terkait keadaan Merapi. Selain itu, jika ada kecelakaan tambang, pohon tumbang atau sejenisnya KSM pun turut membantu. Harapannya, seluruh

hal tersebut dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan wilayah.

Kelima, Gatra Politik. Aspek ini merupakan bagian dari aspek sosial di Pancagatra. Politik dimaknai sebagai salah satu dimensi kehidupan nasional yang membahas tentang kekuasaan pelaksanaan pemerintahan dan proses penyampaian pendapat rakyat sebagai bentuk kedaulatan di tangan rakyat. Secara politik, ancaman bencana dapat mengubah atau merevisi kebijakan dan upaya yang dilakukan secara konseptual maupun prosedural. Pemerintahan Desa Glagaharjo dipimpin seorang Lurah/Kepala Desa, 3 orang Kasi, 3 orang Kaur, 3 staf kelurahan/desa dan 10 orang Dukuh dari 10 padukuhan/dusun. Pelaksanaan program Destana di Desa Glagaharjo mengupayakan dasar sistem penanggulangan bencana dengan adanya kebijakan pendukung dalam upaya pengelolaan risiko bencana di desa/kelurahan. Desa Glagaharjo telah menyusun rencana kontingensi untuk pengurangan risiko bencana. Dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRJMDes). Masyarakat juga dididik dalam memahami risiko bencana. Adanya *contingency plan* membuat desa tak lagi bingung ketika terjadi bencana dan sudah memiliki strategi dalam mengevakuasi warga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Harapannya, masyarakat dapat mengantisipasi ancaman secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga penanggulangan bencana Desa Glagaharjo dapat ditingkatkan.

Keenam, Gatra Ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari kehidupan nasional yang terkait pada pemenuhan kepentingan kebutuhan rakyat yang terdiri dari produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Membangun kesiapsiagaan terhadap risiko bencana yang dapat mengancam keamanan, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat adalah fungsi penting pemerintah, karena pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan mendukung akan memperkuat ketangguhan desa dan berdampak terhadap ketahanan wilayah. Aksi

pemerintah maupun komunitas di Desa Glagaharjo dalam lima tahun terakhir terkait kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan program-program yang menunjang ketersediaan pelayanan publik mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana erupsi Gunung Merapi. Program tersebut diantaranya yaitu pembangunan dan pemeliharaan gedung dan prasarana kelurahan, pengelolaan dan pemeliharaan barak pengungsian dan gedung aula kelurahan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana pariwisata milik kelurahan, pengadaan dan pengelolaan pos kesehatan Covid-19, pengadaan dan pengelolaan pos pemantauan Gunung Merapi serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar kelurahan.

Ketujuh, Gatra Sosial Budaya. Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kemampuan mencegah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks kebencanaan, bencana dapat mengganggu stabilitas, menimbulkan ketidakpastian, kekacauan dan runtuhnya sistem sosial masyarakat. Ketahanan budaya mempertimbangkan bagaimana latar belakang budaya, nilai budaya, bahasa, adat istiadat, dan norma yang berlaku di masyarakat dapat membantu individu dan masyarakat mengatasi berbagai macam kesulitan. Ketahanan wilayah melalui penanaman karakter dan pelestarian budaya pada aspek ini berfokus pada sejauh mana masyarakat memiliki karakteristik tertentu yang mempromosikan tujuan dari ketahanan wilayah itu sendiri.

Seperti yang telah diketahui, Desa Glagaharjo memiliki penguatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat. Desa Glagaharjo memiliki berbagai macam kegiatan kebudayaan dan kesenian berbasis kearifan lokal seperti ketoprak, jathilan, campursari dan lain-lain. Kegiatan spiritual seperti kendurian dan pengajian juga rutin dilaksanakan di desa. Pemerintah Desa selalu menyiapkan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan kesenian, di samping secara aktif mendorong dusun-dusun untuk terus melaksanakan

dan melestarikan kegiatan kesenian. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya, serta menanamkan nilai dan karakter positif yang dapat mengurangi risiko bencana karena timbulnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sebuah rasa persatuan dan kesatuan dalam arti sosial budaya dan menjunjung tinggi tradisi masyarakat, sehingga dapat menghadapi kesulitan dan perubahan meskipun zaman terus berkembang.

Kedelapan atau yang terakhir yaitu Gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Menurut Loqman (1993), keamanan adalah suatu kondisi suatu kondisi bebas dari segala ancaman bahaya serta hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATGH) dari dalam maupun luar negeri. Desa Glagaharjo memiliki 11 pekerja TNI/Polri. Aspek pertahanan dan keamanan di Desa Glagaharjo dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan memaksimalkan seluruh potensi dan kekuatan keamanan secara terpadu dan terkoordinasi, dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi kelangsungan hidup, pembangunan kehidupan bangsa, dan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implikasi pengurangan risiko bencana berbasis Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman, dapat dilihat bahwa seluruh aspek Trigatra maupun Pancagatra telah terlaksana dengan baik dan berkorelasi dengan aspek kehidupan nasional yang terkaji dalam Astagatra. Sesungguhnya, ancaman terhadap ketahanan wilayah kerap kali ditujukan kepada aspek kehidupan sosial atau Pancagatra yang selalu dinamis. Pemerintah tentunya ingin melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana atau

krisis. Dengan Strategi Keamanan Nasional Indonesia melalui program di tingkat desa/kelurahan berbasis Desa Tangguh Bencana, pemerintah dapat mengkaji ancaman, cara mencegahnya, dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dari skala masyarakat terkecil sekalipun. Kesadaran, pendidikan, kesiapsiagaan, sistem prediksi dan peringatan dini yang memadai dapat mengurangi dampak ancaman dari bencana alam pada masyarakat, namun pada akhirnya semua kembali ke kesiapan masyarakat itu sendiri, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan ketahanan Pancagatra secara utuh dan menyeluruh. Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu senantiasa menjaga kualitas Pancagatra di kehidupan yang berbangsa dan terintegrasi. Di sisi lain, masyarakat tetap dapat mempertahankan, memelihara dan mengembangkan aspek alamiah atau Trigatra dengan baik. Melalui program Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo, penerapan Trigatra dan Pancagatra akan menjadi Astagatra yang menciptakan kondisi ketangguhan desa yang kokoh, yang pada akhirnya turut memberi implikasi positif terhadap sistem ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dan kehidupan nasional bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan acuan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diterbitkan oleh BNPB tahun 2015, program Destana Desa Glagaharjo berimplikasi terhadap 33 dari 71 indikator ketahanan wilayah Kabupaten Sleman, yaitu tepatnya pada prioritas 1, 2, 3, 4, 6 dan 7. Hal ini menunjukkan program Destana Desa Glagaharjo berkontribusi sebanyak total 46,48% terhadap aspek ketahanan wilayah Kabupaten Sleman sesuai dengan Gambar 4.6.

Tabel 4.7 menjelaskan rincian kontribusi pada masing-masing prioritas ketahanan wilayah Kabupaten Sleman bahwa program pengurangan risiko bencana berbasis Destana di Desa Glagaharjo memberi implikasi positif terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Sleman di seluruh susunan prioritas, kecuali prioritas 5.

Pertama, pada prioritas 1, yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 89% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 8 dari 9 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen 2 di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu dasar sistem penanggulangan bencana. Prioritas ini berfokus pada semua bentuk kebijakan/regulasi/peraturan yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kedua, pada prioritas 2, yaitu pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 75% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 3 dari 4 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen 4 di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu mengenai kesiapsiagaan darurat, Fokus dari upaya pengurangan risiko bencana pada prioritas ini adalah ketersediaan peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan kajiannya di daerah, serta pada ketersediaan, proses penyusunan, dan pemanfaatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPD) di daerah.

Ketiga, pada prioritas 3, yaitu pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 75% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 8 dari 12 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen 3 di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang pengelolaan risiko bencana, Batasan prioritas ini yaitu mengenai adanya sarana penyampaian informasi, sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi apapun terkait kebencanaan yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut serta harus didiseminasikan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu,

prioritas ini juga mengkaji tentang ketersediaan logistik kebencanaan mulai dari penyimpanan hingga pemeliharaan, serta kemampuan pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala.

Keempat, pada prioritas 4, yaitu penanganan tematik kawasan rawan bencana. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi penuh terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi keseluruhan 5 dari 5 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen pertama di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang adanya kualitas dan akses layanan dasar. Prioritas ini berfokus pada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana, ketersediaan Sekolah/Madrasah dan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, serta realisasi dari Desa Tangguh Bencana itu sendiri. Prioritas ini perlu dilakukan sebagai proses membangun ketangguhan yang berkelanjutan dan menjadikan budaya sadar bencana menjadi nilai-nilai dalam pembangunan di tingkat desa. Berdasar Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dari BNPB (2015), adanya pemenuhan akses layanan dasar dan infrastruktur dapat mempromosikan ketahanan masyarakat dan membantu pemulihan bencana. Hal ini sesuai dengan Maskrey (1998) yang menyatakan bahwa pengelolaan bencana seharusnya tidak hanya terbatas pada pendekatan fisik yang bersifat sesaat saja, namun harus dilakukan juga bersama dengan kehidupan sosio ekonomi masyarakat lokal yang terdampak secara berkelanjutan.

Kelima, pada prioritas 5, yaitu peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Program Destana di Desa Glagaharjo belum dapat memberikan implikasi terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman pada prioritas ini, karena belum dapat memenuhi 12 indikator yang tercantum dalam Juknis IKD. Risiko ancaman bencana pada prioritas 5 tidak sesuai dengan ancaman bencana yang terdapat di Desa Glagaharjo, Prioritas ini berfokus pada mitigasi bencana banjir, tanah longsor, tsunami,

gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan lahan pertanian. Sedangkan program Destana Desa Glagaharjo berfokus ke ancaman erupsi gunungapi yaitu Gunung Merapi. Hal ini dikarenakan letak geografis dan klimatologis Desa Glagaharjo memang berada di bagian lereng Merapi dengan jarak 4-5 km dari puncak, serta mengetahui fakta bahwa Desa Glagaharjo menjadi desa yang paling terdampak erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu, sehingga membuat Desa Glagaharjo menjadi KRB III.

Keenam, pada prioritas 6, yaitu perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 50% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 7 dari 14 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen keempat di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang kesiapsiagaan darurat. Fokus pada prioritas ini yang berkorelasi dengan penilaian Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan, khususnya di Desa Glagaharjo adalah adanya rencana kontingensi untuk ancaman erupsi gunungapi. Selain itu, prioritas ini juga menitikberatkan ketersediaan sistem peringatan dini, seperti adanya pemasangan EWS (*Early Warning System*) di Desa Glagaharjo. Sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya erupsi gunungapi, serta menimbulkan rasa aman di masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman erupsi gunungapi.

Ketujuh, pada prioritas 7, yaitu pengembangan sistem pemulihan bencana. Sama seperti prioritas 6, program Destana di Desa Glagaharjo memberikan implikasi sebesar 50% terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman dengan memenuhi 2 dari 4 indikator. Prioritas ini sesuai dengan komponen terakhir atau kelima di penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan, yaitu membahas tentang kesiapsiagaan pemulihan. Adapun kesiapsiagaan pemulihan yang dimaksud berfokus

pada adanya pemulihan pelayanan dasar pasca bencana, yang menitikberatkan pada keterlibatan aksi pemerintah maupun komunitas tentang ketersediaannya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pada saat pasca bencana untuk ancaman bencana. Sebagai desa berbasis Desa Tangguh Bencana, perwujudan program Desa Tangguh Bencana di Desa Glagaharjo mampu dilakukan secara mandiri yang dilaksanakan oleh Unitlak Kebencanaan dan dibantu oleh Komunitas Siaga Merapi (KSM).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar, Winarna, & Priyanto (2020) dan Pradika, Giyarsih & Hartono (2018) bahwa pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) berimplikasi positif terhadap ketahanan wilayah.